



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROSES PEMULIHAN BENCANA GEMPA
PADA TAHUN 2009 DI KOTA PADANG**

**(Studi Kasus Upaya Pemulihan yang Dilakukan
Oleh Pemerintah Kota Padang)**

SKRIPSI

**SIGIT SETIAGENI
0606096540**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
DESEMBER 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROSES PEMULIHAN BENCANA GEMPA
PADA TAHUN 2009 DI KOTA PADANG**

(Studi Kasus Pemerintah Kota Padang)

SKRIPSI


**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
kesejahteraan sosial**

**SIGIT SETIAGENI
0606096540**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
DESEMBER 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar.

Nama : Sigit Setiageni
NPM : 0606096540
Tanda tangan : 
Tanggal : 30 Desember 2011

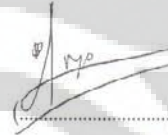
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Sigit Setiageni
NPM : 0606096540
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Proses Pemulihan Bencana Gempa Pada Tahun
2009 Di Kota Padang (Studi Kasus Upaya
Pemulihan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota
Padang)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

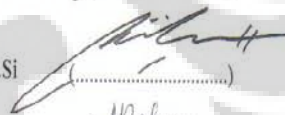
DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bagus Aryo, Ph.D



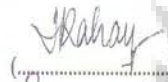
(.....)

Penguji Ahli : Rissalwan Habdy Lubis, M.Si



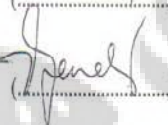
(.....)

Ketua Sidang : Dra. Ety Rahayu, M.Si



(.....)

Sekretaris Sidang : Dra. Djoemeliarasanti, MA



(.....)

Ditetapkan di : FISIP UI, Depok
Tanggal : 30 Desember 2011

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya pengerjaan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya yang setia. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kesejahteraan Sosial Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bagus Aryo Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Fentiny Nugroho Ph.D sebagai pembimbing akademis yang telah memberikan segala perhatian dan masukan selama masa perkuliahan.
3. Dra. Ety Rahayu, M.Si selaku ketua program sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, dan seluruh dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial lainnya yang telah mengajar dan membimbing saya selama ini, serta staf didalamnya yang telah membantu dalam berbagai hal.
4. Seluruh keluarga saya terutama Bapak Djasli Djamarus, Ibu Iryani Syafril, Setra Ragasta dan Oksiadri Abacy yang selalu memberi doa, membantu dalam finansial serta dukungan moral yang tiada henti kepada saya untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Kessos 2006, Erick, Wishnu, Aul, Ido, Jimmi, Wien, Niken, Amie, Mita, Bana, Tya, Iwi, Lucky, Keke, Vidy, Anggi, Dinka, Inggar, Resti, Merto, Fadli, Reka, Chici, Tyas, Getar, Eka, Dina, Octa, dan Vina yang dari awal perkuliahan telah bersama menjalani masa-masa belajar.

6. Kepada teman-teman Kessos angkatan atas dan bawah yang telah memberi informasi, dukungan, saran dan motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan FISIP UI 2006 yang telah banyak membantu saya dan memberikan masukan-masukan yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
8. Asri Citra Triandi yang selalu cerewet kepada saya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesegera mungkin.
9. Pihak-pihak yang telah membantu saya selama melakukan penelitian di Padang terutama kepada Tante Arni, Ivan dan Vani yang telah bersedia menyediakan tempat tinggal sementara untuk saya di Padang.
10. Pemerintah Kota Padang bidang penanggulangan Bencana (BPBD) dan BAPPEDA Kota Padang yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang saya butuhkan demi kelancaran penelitian.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha kuasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan pembacanya.

Depok, Desember 2011

Sigit Setiageni

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sigit Setiageni
NPM : 0606096540
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Departemen : Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Proses Pemulihan Bencana Gempa Pada Tahun 2011 Di Kota Padang (Studi Kasus Upaya Pemulihan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang)

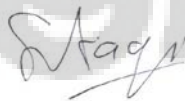
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 30 Desember 2011

Yang menyatakan



(Sigit Setiageni)

ABSTRAK

Nama : Sigit Setiageni
Program studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul skripsi : Proses Pemulihan Bencana Gempa Pada Tahun 2009 di Kota Padang (Studi Kasus Upaya Pemulihan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Padang)

Skripsi ini membahas mengenai upaya pemulihan bencana gempa pada tahun 2009 di kota Padang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan langkah-langkah manajemen penanggulangan pasca-gempa khususnya upaya pemulihan di Kota Padang. Informan dari penelitian ini adalah anggota Pemerintah kota Padang bidang penanggulangan bencana dan anggota BAPPEDA kota Padang yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini adalah proses pemulihan berupa delapan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang serta juga ditemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat.

Kata kunci:

Manajemen Penanggulangan Bencana, Upaya Pemulihan, Gempa

ABSTRACT

Name : Sigit Setiageni
Major : Social Welfare Studies
Title : Earthquake Recovery Process on 2009 in Padang
(Case Study Recovery by Padang City
Government)

This research elaborate issues about earthquake disaster recovery in Padang at 2009. This research is a qualitative research with descriptive design. The purpose of this research is to describe the process of disaster management especially in recovery in Padang. Informant in this research are members of Padang government and member of BAPPEDA Padang that choosed by purposive sampling. The result of this resarch is recovery process that made by Padang government which contain eight policy and there also found supportive factors and inhibiting factors during this recovery

Key words:

Disaster management, recovery, earthquake

DAFTAR ISI

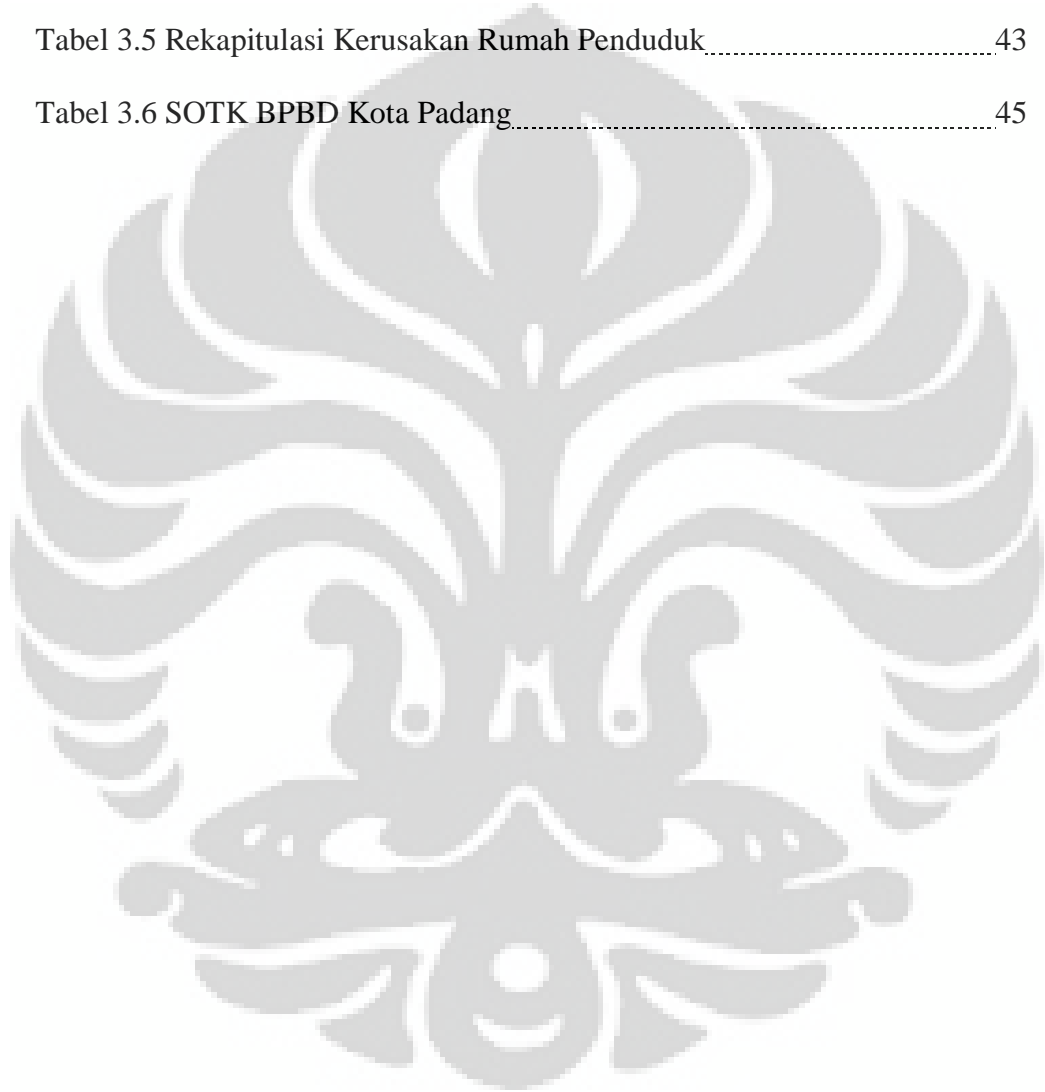
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	10
1.5.2 Lokasi Penelitian	11
1.5.3 Teknik Pemilihan Informan	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	12
1.5.5 Teknik Analisa Data	13
1.5.6 Sistematika Penulisan	14
2. KERANGKA PEMIKIRAN	16
2.1 Bencana	16
2.2 Gempa Bumi	17
2.3 Manajemen Penanggulangan Bencana	18
2.4 Pendekatan Manajemen Penanggulangan Bencana	19
2.5 Upaya Pemulihan Pasca Bencana	21
2.5.1 Komponen Pemulihan	30
2.5.2 Peran Pemerintah Saat Pemulihan	35
3. GAMBARAN UMUM	37
3.1 Letak Geografis	37
3.2 Demografi	41
3.3 Gempa 30 September 2009	42
3.4 Organisasi	44
3.5 Upaya Penanggulangan Bencana	49
3.5.1 Upaya Pemulihan	49
4. TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISA	53
4.1 Upaya Pemulihan	53
4.1.1 Perencanaan	53
4.1.2 Koordinasi	65
4.1.3 Pengkajian Kerusakan	67
4.1.4 Uang dan Perlengkapan	69
4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat	71

4.2.1 Faktor Pendukung.....	71
4.2.2 Faktor Penghambat.....	73
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.1.1 Upaya Pemulihan.....	76
5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR REFERENSI	82



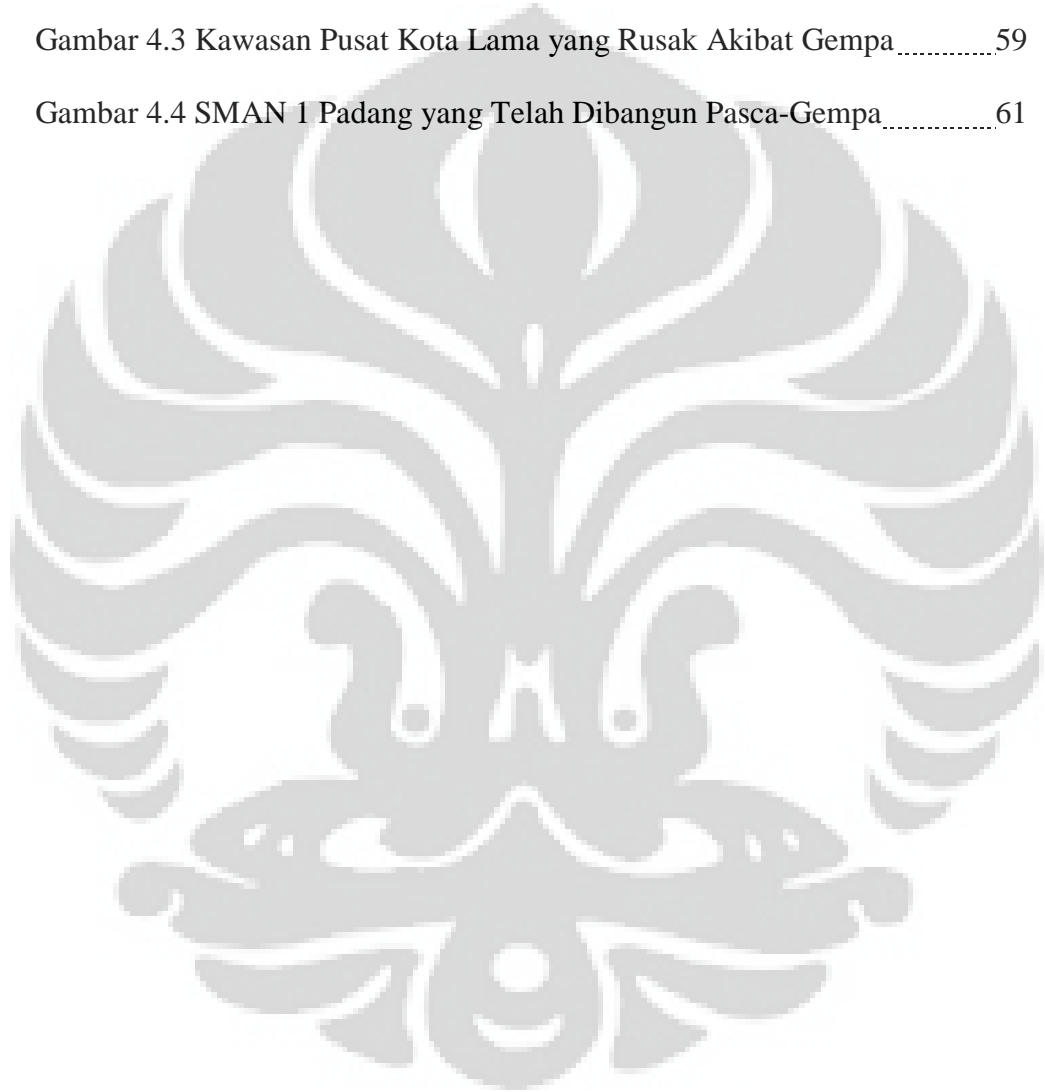
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Lahan Per Kecamatan Di Kota Padang.....	37
Tabel 3.2 Tinggi Daerah Menurut Kecamatan.....	38
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin.....	41
Tabel 3.4 Rekapitulasi Korban Gempa Bumi 30 September.....	42
Tabel 3.5 Rekapitulasi Kerusakan Rumah Penduduk.....	43
Tabel 3.6 SOTK BPBD Kota Padang.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Padang.....	40
Gambar 3.2 Kantor BPBD Padang.....	46
Gambar 4.1 Kantor walikota Padang yang Rusak Akibat Gempa.....	55
Gambar 4.2 Kondisi Pasar Raya.....	57
Gambar 4.3 Kawasan Pusat Kota Lama yang Rusak Akibat Gempa.....	59
Gambar 4.4 SMAN 1 Padang yang Telah Dibangun Pasca-Gempa.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Resiko bencana alam yang tinggi di wilayah tanah air kita disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dapat memicu meningkatnya kerentanan. Peningkatan kerentanan ini akan menjadi lebih parah apabila aparat pemerintah maupun masyarakat, sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya resiko bencana alam di daerahnya masing-masing. Pengalaman memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian bencana alam selama ini telah banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari kombinasi dari bahaya alam dan kompleksitas permasalahan lainnya.

Bunsen (dalam Warto dkk, 2003: 10-11) menjelaskan bahwa penyebab bencana karena faktor alam seperti:

1. Gunung meletus dan gempa bumi, ditandai dengan suhu di sekitar naik, banyak sumber mata air kering, sering timbul gempa bumi, banyak binatang yang berpindah dan sering terdengar suara gemuruh.
2. Pelapukan, yaitu peristiwa hancurnya batuan yang awalnya karena pengaruh dari kulit bumi.
3. Erosi dan pengikisan, yaitu peristiwa terbawanya material batuan atau tanah oleh pengerjaan air, angin atau gletser.
4. Tanah menjalar, bencana ini disebabkan batuan yang sudah lapuk jenuh air pada tanah miring. Gejala tanah menjalar ini tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dapat diamati dengan melihat pepohonan atau tiang listrik yang condong.
5. Tanah longsor, yaitu peristiwa pengelupasan batuan induk yang telah mengalami proses pelapukan, sehingga tanah menjadi longsor.

Sedangkan bencana yang disebabkan karena ulah manusia antara lain disebabkan oleh:

1. Gencarnya pembangunan fisik, terutama di kota yang kurang memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan alam.
2. Banyaknya pengerukan areal rawa-rawa
3. Pembangunan perumahan dengan cara memampas daerah perbukitan dan menebangi pohon.
4. Kebakaran hutan.
5. Pembangunan rumah atau gedung kaca yang dapat menimbulkan pemanasan global.

Setiap bencana alam yang terjadi menelan korban jiwa, baik itu meninggal, luka-luka, dan lain-lain. Penduduk atau masyarakat di daerah bencana yang kehilangan tempat tinggalnya karena rusak atau hancur terpaksa harus mengungsi agar dapat mempertahankan hidupnya. Masyarakat korban Bencana membutuhkan bantuan yang komprehensif. Korban bencana alam menghadapi situasi dan kondisi yang sangat kompleks, baik secara fisik, psikologis maupun sosial (Korban Bencana Gempa, 2009). Korban bencana yang mengalami kerugian harta benda pada umumnya merupakan salah satu penyebab mereka menjadi miskin.

Selain itu penduduk yang kehilangan anggota keluarga pada saat bencana menyebabkan rasa khawatir, ketakutan bahkan trauma yang berkepanjangan. Masyarakat korban bencana biasanya akan mengalami dampak fisik dan psikologis. Korban kematian, luka-luka, pengungsi, masalah makanan, ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular dan gangguan kejiwaan atau stress, malapetaka sosial yang berskala luas, masalah traumatis, kehancuran infrastruktur dan fasilitas umum, serta kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan merupakan efek samping yang ditimbulkan dari kejadian bencana alam.

Dampak yang ditimbulkan dari bencana ini bermacam-macam. Ada dampak primer, yaitu dampak yang terjadi akibat proses bencana itu sendiri. Lalu ada pula dampak sekunder yang merupakan kelanjutan dari dampak primer tadi, dan juga terdapat dampak tersier yang merupakan dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh suatu bencana, misalnya hancurnya suatu habitat akibat bencana tsunami atau letusan gunung merapi. Sekali lagi dikatakan bahwa bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia seringkali menimbulkan banyak korban, baik harta,

benda maupun manusia sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar yang berdampak pada ekonomi, sosial serta lingkungan masyarakat dan pemerintah. (Bencana Gempa Bumi, 2009)

Kemudian apabila kita melihat secara umum, bencana alam yang cukup sering terjadi di wilayah Indonesia adalah gempa bumi. Hal ini dikarenakan Kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Eurasia dan Australia bertumbukan di lepas pantai barat Pulau Sumatera, lepas pantai selatan pulau Jawa, lepas pantai Selatan kepulauan Nusatenggara, dan berbelok ke arah utara ke perairan Maluku sebelah selatan. Antara lempeng Australia dan Pasifik terjadi tumbukan di sekitar Pulau Papua. Sementara pertemuan antara ketiga lempeng itu terjadi di sekitar Sulawesi (Bumi Indonesia, 2009).

Gempa bumi disebabkan oleh adanya pergeseran tiba-tiba dari lapisan tanah di bawah permukaan bumi. Ketika pergeseran ini terjadi, timbul getaran yang disebut *gelombang seismic* (gempa ke segala arah di dalam bumi). Ketika gelombang ini mencapai permukaan bumi, getarannya bisa merusak atau tidak tergantung pada kekuatan sumber dan jarak fokus, disamping itu juga mutu bangunan dan mutu tanah dimana bangunan berdiri. (Bumi Indonesia, 2009).

Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang dihantam gempa pada tahun 2009 berada di bagian barat tengah pulau Sumatera dengan luas 42.297,30 km². Provinsi ini memiliki dataran rendah di pantai barat, serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk Bukit Barisan yang membentang dari barat laut ke tenggara. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudera Hindia termasuk dalam provinsi ini. Garis pantai Sumatera Barat seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 375 km.

Bagian Utara wilayah provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, bagian Timur dengan Provinsi Riau, bagian Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan bagian barat dengan Samudera Hindia. Penduduk Sumatera Barat berdasarkan data proyeksi tahun 2008 sebanyak 4.845.998 jiwa terdiri dari laki-laki 2.37 juta jiwa laki-laki dan perempuan 2.47 juta jiwa dengan ratio jenis kelamin sebesar 97,08,

artinya untuk setiap seratus penduduk perempuan terdapat 97 atau 98 orang penduduk laki-laki. (Penduduk Sumatera Barat, 2009)

Gempa Sumatera Barat pada tahun 2009 benar-benar meluluh-lantakkan aktifitas masyarakat kota Padang pada umumnya. Kejadian ini berawal dari adanya 2 gempa yang terjadi dalam rentan waktu kurang dari 24 jam pada lokasi yang relatif berdekatan. Gempa pertama terjadi pada tanggal 30 September pukul 17.18 WIB dengan kekuatan 7,9 skala richter dengan pusat gempa berasal terletak pada 57 kilometer sebelah Barat Daya kota Pariaman dengan kedalaman 71 kilometer. Kemudian pada tanggal 1 Oktober terjadi lagi gempa kedua dengan kekuatan 6,8 skala richter dengan pusat gempa berada 46 kilometer di sebelah Tenggara kota Sungaipenuh pada pukul 08.52 WIB dengan kedalaman 24 kilometer. Berdasarkan data yang penulis peroleh, total kerusakan rumah yang diakibatkan oleh gempa tersebut adalah 249.833 unit dengan rincian rumah rusak berat 14.797 unit. Sedangkan rumah rusak sedang 67.198 unit, dan rusak ringan 67.838 unit. Berdasarkan angka resmi yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah korban tewas adalah 1.115 dan 343 orang dilaporkan hilang.

Sementara itu data dari IDEP Foundation (2010) mengatakan bahwa ada masalah-masalah yang timbul pasca gempa Sumatera Barat tahun 2009. Beberapa masalah mulai muncul setelah “penanganan cepat” gempa di Sumbar. Dilihat secara kasat mata memang sumbar tidak terlalu “parah” namun jika ditelusuri sampai kewilayah pelosok, terlihat hanya atap-atap yang ada, ditambah dengan puing-puing reruntuhan serta kerusakan infrastruktur yang jika tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan masalah baru. Beberapa masalah yang akan muncul dan bahkan telah muncul pasca gempa adalah (IDEP Foundation, 2010):

1. Mulai banyaknya anak-anak yang dieksploitasi menjadi “tukang pinta” dipinggir jalan (Kondisi ini terlihat di Jalan mulai memasuki wilayah Padang Pariaman dan jalan Agam menuju Pasaman Barat)
2. Banyak daerah-daerah yang tidak mendapatkan bantuan (mendapatkan bantuan tetapi hanya sekali atau dua kali) dikarenakan wilayah mereka dianggap “tidak banyak” yang rusak parah

3. Menumpuknya bantuan disatu tempat/wilayah karena daerah/wilayah ini dianggap terlalu parah
4. Munculnya klaim intervensi wilayah oleh beberapa lembaga tetapi sampai saat ini tidak ada bantuan yang diturunkan
5. Belum adanya proses transparansi anggaran baik dari pemerintah, NGO Internasional dan NGO lokal untuk penanggulangan bencana (tanggap darurat)
6. Verifikasi bangunan yang tidak tepat sasaran
7. Tingkat pengangguran yang melonjak tajam

Masalah yang pertama adalah semakin banyaknya eksploitasi anak. Salah satu alasan dari orang tua dan bahkan anak-anak yang meminta-minta adalah minimnya bantuan yang mereka dapatkan setelah mengalami gempa dan kehilangan rumah, disadari atau tidak pemerintah dan NGO harus melihat ini secara mendalam, karena jika kondisi ini dibiarkan maka akan menjadi suatu kebiasaan yang mengakibatkan orang akan menjadi malas untuk bekerja. Orang tua akan cenderung untuk meminta anak-anaknya menggunakan dus/ember dan berdiri di pinggir jalan, karena ini dianggap paling mudah mendapatkan uang. Bagi Anak-anak yang sudah terbiasa juga akan berimbas kepada proses pendidikan, karena belajar dianggap tidak mendatangkan hasil.

Masalah kedua adalah tidak meratanya pemberian bantuan. Berdasarkan data dari IDEP Foundation (2010), pada hari ke 22 masih ada ditemukan daerah-daerah yang tidak mendapatkan bantuan karena memang kerusakan didaerah mereka tidak mencapai 70% dari total rumah/bangunan yang ada. Korban yang berada didaerah ini cenderung terabaikan, terutama oleh NGO Internasional dan bahkan NGO Lokal. Tindakan seperti menghilangkan cermin penanggulangan yang tidak siap dan berperspektif kemanusiaan, cenderung melihatkan kekuatan bahwa “mereka mampu membantu masyarakat dengan skala besar”. Refleksi ini bisa dilihat tiga hari pasca gempa 30 September ratusan NGO baik nasional, lokal dan bahkan media massa terfokus pada Kota Padang terutama pada daerah-daerah yang banyak reruntuhannya (serta korban yang meninggal) seperti Hotel Ambacang, Gamma, Adira, LIA, Prayoga. Sedangkan untuk wilayah pinggir kota nyaris tidak ada. Lalu mendengar bahwa wilayah Padang Pariaman longsor dan banyak korban jiwa pada hari ketiga

dan keempat, semua organisasi terfokus kepada Padang Pariaman dan berbondong-bondong menuju Padang Pariaman dan fokus wilayah diantaranya Padang Sago, Padang Alai, Sikujur, Gunuang Tigo, sebagian daerah Agam yaitu Malalak. Hari kesekian, baru ada yang menuju Salingka Danau Maninjau yaitu daerah Tanjuang Raya Nagari Tanjuang Sani yang perbukitannya longsor, tercatat Lumbung Derma datang ke Agam pada hari keenam, bantuan yang ada hanya dari pemda, dan Tenda beserta beras yang dibagikan oleh Lumbung Derma setelah untuk datang tim kesehatan dari Tim Ishak, dan bantuan dari sektor privat (IDEP Foundation, 2010). Kondisi diatas juga terjadi sampai sekarang, terlihat beberapa lembaga hanya terfokus pada Padang Pariaman, Kota Padang pun sudah ditinggalkan dan hanya ada beberapa lembaga yang masih fokus untuk melakukan penanggulangan bencana di daerah padang. Beberapa daerah Pasaman Barat pun terluput dari bantuan semisal daerah di Kinali dan Kapar. Kondisi ini akan menyebabkan kecemburuan di tingkat masyarakat korban gempa dan dapat memancing konflik.

Masalah berikutnya ialah transparansi. Sampai saat ini belum ada pemberitahuan terhadap khalayak ramai (masyarakat) berapa jumlah organisasi yang datang ke Sumbar untuk penanggulangan bencana, dari mana asalnya dan apa yang dilakukan, pengumuman itu hanya ada di kantor Gubernur dan hanya diketahui jika kita meminta kepada petugas yang bekerja di kantor Gubernur. Seharusnya siapa dan melakukan apa diumumkan di media sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terhadap penanganan bencana, selain itu proses transparansi terhadap anggaran penanggulangan bencana serta seperti apa penanggulangan yang akan dilakukan juga tidak ada. Transparansi ini seharusnya dilakukan oleh Pemerintah, International NGOs dan Local NGOs. Kemudian selanjutnya masalah pembagian lauk pauk juga cukup menjadi perhatian pasca gempa kali ini. Masalah ini sempat menimbulkan masalah di tengah masyarakat bahkan sampai sekarang, karena masih banyak orang yang tidak mendapatkan bantuan uang ini, jumlahnya Rp 5000/orang/hari dengan maksimal jumlah orang dalam satu KK adalah 5 orang. Beberapa pertanyaan yang muncul adalah siapa yang berhak menerima, apakah yang rumahnya rusak berat saja, atau semua orang yang menjadi korban Gempa?

Beberapa hari pasca gempa, pemerintah telah melakukan verifikasi terhadap bangunan yang rusak akibat gempa, verifikasi tersebut diserahkan kepada Universitas yang dianggap berkompeten, setiap rumah yang di cek diberi tanda, Merah untuk tidak layak huni, Kuning tanda bahwa rumah ini rusak sedang dan Hijau tanda bahwa rumah ini layak huni, namun penentuan kriteria terhadap bangunan tersebut tidak diumumkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang merasa rumahnya rusak berat dan ditempelkan warna kuning atau hijau akan merasa cemas. Selain itu tujuan dari verifikasi juga tidak jelas, apakah hanya sebagai penanda atau akan ada bantuan terhadap mereka. Dan selanjutnya masalah yang hampir dilupakan ialah masalah pengangguran. Beberapa perusahaan di Sumbar mengalami kerusakan yang cukup parah dan hebat, bahkan tidak sedikit yang hancur, yang berakibat banyak dari orang yang hilang pekerjaan, diantaranya beberapa Hotel berbintang di Padang, Mal dan Supermarket, serta beberapa perusahaan seperti Semen Padang, Fajar Utama Tiga Berlian, Bank Mandiri, dll.

Dengan melihat fenomena yang terjadi di Sumatera Barat sebagai dampak serta akibat dari bencana gempa pada tahun 2009 tersebut, maka penulis merasa bahwa dibutuhkan sebuah metode penanggulangan bencana khususnya upaya pemulihan yang efektif serta tepat sasaran dalam rangka mengembalikan daya guna masyarakat di Provinsi Sumatera Barat khususnya di kota Padang.

Pada kenyataannya, pemulihan bencana merupakan fungsi dari manajemen bahaya yang dilakukan oleh negara, dimana setiap komunitas, keluarga dan memperbaiki individu, merekonstruksi atau mendapatkan kembali apa yang hilang ketika bencana terjadi. Idealnya, mengurangi resiko dari kejadian yang sama ketika bencana tersebut terjadi lagi di masa yang akan datang (Coppola, 2007: 299). Upaya pemulihan merupakan langkah yang sulit dan tidak tentu, termasuk informasi, semuanya memiliki peran dalam upaya pemulihan di masyarakat. Tindakan yang terkait dengan pemulihan bencana merupakan yang paling beragam dari semua fungsi manajemen bencana. Cakupan individu, organisasi dan kelompok yang terlibat juga lebih besar daripada di fungsi lain.

Yadrison (2003) dalam penelitiannya tentang Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat Provinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan relokasi, rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi bagian yang penting dalam masyarakat yang tertimpa bencana. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penerapan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Sumatera Barat berupa melaporkan jumlah korban bencana dan mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan pemerintah dalam pembangunan. Adapun sumber daya penanggulangan bencana yang digunakan berupa peralatan, SDM untuk pengadaan tenaga manusia dalam melaksanakan program penanggulangan bencana, dan penganggaran dana untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana.

Penelitian tersebut menggambarkan mengenai relokasi korban bencana pada tahun 2001-2002 dimana bencana longsor pada saat itu menghantam daerah Solok, rekonstruksi daerah yang terkena bencana, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kunjungan ke daerah-daerah yang rentan terhadap bencana, pembentukan tim penggalangan partisipasi penanggulangan bencana. Adapun penjelasan lainnya mengenai sosialisasi terhadap ancaman bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh bencana.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yadrison tersebut berupa implementasi fungsi program penanggulangan bencana setelah bencana terjadi oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan pelaporan korban, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan relokasi dan rekonstruksi bencana, penempatan kembali korban bencana serta pemberian bantuan rehabilitasi perumahan dan pemukiman; dan mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Sesuai dengan tema penelitian, bahwa dibutuhkan sebuah metode penanggulangan bencana khususnya upaya pemulihan yang efektif serta tepat sasaran dalam rangka mengembalikan daya guna masyarakat di Provinsi Sumatera Barat khususnya di kota Padang. Oleh sebab itu, Kota Padang dipilih sebagai lokasi penelitian dan Pemerintah Kota Padang dalam hal ini sebagai objek penelitian. Hal itu dikarenakan berdasarkan pengamatan peneliti, Kota Padang memiliki cukup banyak bangunan yang rusak, banyaknya korban jiwa serta kondisi masyarakat yang kacau beberapa saat pasca terjadinya bencana gempa pada tahun 2009.

I.2. Perumusan Masalah

Dengan melihat gambaran bencana yang terjadi di Sumatera Barat, maka perlu adanya analisa tentang proses upaya pemulihan sebagai bagian dari manajemen penanggulangan bencana yang terjadi di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang. Sebagaimana yang telah dijelaskan diawal mengenai pentingnya proses pemulihan yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap daerah yang dihantam oleh bencana. Program pemulihan itu sendiri ditujukan kepada keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mengembalikan fungsi masyarakat pada umumnya. Maka dari itu pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses upaya pemulihan bencana pasca-gempa di kota Padang yang di terapkan oleh Pemerintah Kota Padang?
2. Faktor penghambat dan pendukung seperti apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam rangka melakukan upaya pemulihan bencana pasca-gempa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses manajemen penanggulangan bencana pasca-gempa khususnya upaya pemulihan di Kota Padang.
2. Mendeskripsikan hambatan-hambatan dan hal-hal yang mendukung apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam melakukan upaya pemulihan pasca gempa pada tahun 2009.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis : menggambarkan proses pemulihan bencana yang dilakukan di wilayah Kota Padang untuk dijadikan masukkan dalam mengembangkan proses penanggulangan bencana.
2. Manfaat Akademik : memperkaya kajian ilmu kesejahteraan sosial, khususnya untuk menjadi referensi mata kuliah manajemen penanggulangan bencana.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen penanggulangan bencana pasca-gempa khususnya yang berkaitan dengan proses pemulihan yang terjadi di kota Padang pada akhir September 2009 lalu. Penelitian ini merupakan studi kasus dimana penelitian studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan sumber informasi (Yin, 1984: 23). Penelitian ini dibatasi oleh waktu, tempat dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas atau individu.

Sesuai dengan tujuan tersebut maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Terkait dengan hal ini, seperti yang dikatakan oleh Margaret Alston dan Wendy Bowles (1998: 9) bahwa penelitian kualitatif tidak seperti penelitian kuantitatif yang berusaha untuk menemukan hukum yang berlaku umum, melainkan lebih mencoba menerjemahkan fenomena sosial, memahami pengalaman kehidupan seseorang, eksplorasi konsep baru (Bowles, 1998: 9).

Begitu juga dengan Lincoln dan Guba (1985: 39-44) dalam buku Moleong (2004: 5) metode kualitatif ini dipilih karena lebih mudah untuk mengalami penyesuaian apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; metode ini memperlihatkan langsung korelasi antara peneliti dan responden; dan metode ini lebih peka dan mudah beradaptasi dengan banyak pengaruh dan terhadap pola-pola nilai yang ada dilapangan.

Selain itu pendekatan kualitatif dipilih karena menekankan pada manfaat dan pengumpulan informasi dengan mendalami fenomena yang diteliti. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis/lisan dari pelaku yang diamati, ciri dari metode kualitatif adalah lebih mementingkan proses daripada hasil (Moleong, 2004:3).

1.5.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Padang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena di daerah ini pernah terjadi bencana gempa sebesar 7.9 SR dan banyak bangunan yang mengalami kerusakan cukup parah pada tahun 2009 serta banyak menimbulkan korban jiwa.

1.5.3. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan di dalam penelitian ini bersifat *purposive*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 2004:91). Karena penelitian ini kualitatif dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Maka teknik pemilihan informan di dalam penelitian ini bersifat *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2009: 52). Jadi yang akan diambil sebagai sampel (informan) dalam penelitian ini adalah mereka yang benar-benar mengetahui (*key informant*) fenomena yang hendak diteliti dan mewakili populasi. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2007: 132).

Berdasarkan keterangan tersebut, maka informan yang akan dipilih adalah orang-orang yang ada di dalam struktur pemerintahan kota Padang seperti, kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BDPB kota Padang, kepala seksi Rehabilitasi BPBD kota Padang, Staf Rehabilitasi BPBD kota Padang dan kepala bidang Sarana Prasana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. Dalam penelitian ini informan sengaja dipilih dengan pertimbangan bahwa informan tersebut dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data-data secara jelas dan lengkap dalam menjawab permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan begitu peneliti berharap para informan dapat membantu mengungkapkan apa yang hendak dicari oleh peneliti dan oleh karenanya mereka tidak disebut sebagai responden tetapi informan. Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007: 132) mengungkapkan bahwa kegunaan informan bagi peneliti adalah

agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai *sampling internal*, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dengan membaca dan menganalisa literatur-literatur yang terkait dengan tema penelitian. Sebelum memasuki lapangan dilakukan pencarian literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan tema penelitian yang diangkat sehingga bisa didapatkan gambaran manajemen penanggulangan bencana di wilayah Sumatera Barat

b) *In depth interview* atau wawancara mendalam

Dengan media wawancara mendalam ini dapat diperoleh data primer dari informan secara lengkap dan detail. Menurut Chadwick (1991: 121) wawancara adalah "suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi. wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah percakapan dua orang dengan tujuan memperoleh keterangan sesuai dengan penelitian dan dipusatkan pada isi yang dititikberatkan pada tujuan-tujuan deskripsi, prediksi dan penjelasan sistematis mengenai penelitian tersebut."

Penelitian ini menggunakan *in-depth interview* dengan semi-terstruktur. Pendekatan semi-terstruktur ini berusaha untuk menggali kedalaman persepsi/pandangan dari informan yang dikaitkan tujuan penelitian dengan pertanyaan terbuka. Selain itu indepth interview dilakukan karena sudah ada relasi sebelumnya dengan informan. Teknik yang akan digunakan adalah *probing* yaitu usaha untuk menggali informasi lebih dalam dari informan (Grinell,1993: 11).

Penelitian ini juga menggunakan pedoman wawancara yang penggunaannya bersifat dinamis. Pedoman wawancara bisa berubah-ubah jika diperlukan, dan dapat ditanyakan secara tidak berurutan kepada informan tergantung kondisi dan situasi dalam penyampaian informasi oleh informan. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan terbuka yang memberikan keleluasaan bagi informan untuk mengemukakan pandangannya secara bebas. Percakapan yang digunakan juga

bersifat informal agar suasana lebih santai dan tidak tegang. Sehingga melalui suasana kondusif dan nyaman tersebut dapat dikumpulkan bahan-bahan dan data tentang manajemen penanggulangan bencana di wilayah Sumatera Barat.

c) Observasi

Menurut Hadi (1984:36) dalam Faisal (2003:52), kegiatan observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan dengan mata kepala sendiri secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi dalam observasi ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, peristiwa, proses atau perilaku.

Penelitian ini mengobservasi gambaran tempat, proses pemulihan, serta implementasi upaya pemulihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang, untuk menggambarkan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam melakukan upaya pemulihan. Observasi ini bertujuan untuk memperkuat hasil pengumpulan data, juga untuk melengkapi bagian bab 3 tentang gambaran umum lokasi penelitian dan lembaga.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006: 3), analisa data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan, yang kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti (terhadap suatu fenomena) dan membantu peneliti untuk mempresentasikan penemuannya kepada orang lain. Berikut ini adalah prosedur analisis data kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini (Irawan 2006: 76-80):

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahapan ini, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka. Pada tahap ini peneliti dapat menggunakan alat-alat yang diperlukan seperti *tape recorder*, kamera, buku catatan dan lain-lain.

2. Transkrip Data

Pada tahapan ini, peneliti merubah catatan penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan menjadi bentuk tertulis, baik yang berasal dari *tape recorder* maupun catatan tangan. Hasil dari bentuk tertulis tersebut praktikan ketik sama persis seperti apa adanya dari verbatim.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check* dan *re-check* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Pertama, satu sumber cocok dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dari sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga, satu sumber seluruhnya bertolak belakang dengan sumber lain.

4. Penyimpulan Akhir

Untuk sampai pada tahap ini, ada kemungkinan peneliti akan mengulangi langkah satu sampai langkah tiga, sebelum peneliti mengambil kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitiannya. Kesimpulan akhir diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).

1.5.6. Sistematika Penulisan

1. Bab Satu Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, tujuan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, teknik analisa data hingga sistematika penulisan.

2. Bab Dua Kerangka Pemikiran

Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka berfikir dan analisa penelitian. Teori-teori yang ada di dalam bab ini mengenai bencana, manajemen penanggulangan bencana dan upaya pemulihan.

3. Bab Tiga Gambaran Umum

Bab ini berisikan gambaran mengenai kondisi Kota Padang, seperti letak geografis dan demografi. Gambaran mengenai gempa 30 September 2009 yang menghantam Kota Padang juga dibahas dalam bab ini seperti jumlah korban serta

jumlah kerusakan rumah penduduk. Selain itu gambaran mengenai organisasi penanggulangan bencana Kota Padang juga dijelaskan disini seperti BPBD dan BPRR. Terakhir, gambaran umum penjelasan mengenai manajemen penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang seperti mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan upaya pemulihan.

4. Bab Empat Temuan Lapangan dan Analisa

Bab ini berisikan data-data yang diperoleh dari lapangan. Data-data tersebut berisikan mengenai upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang beserta hambatan dan faktor pendukung yang ada saat melakukan upaya pemulihan. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang ada di bab II (kerangka pemikiran).

5. Bab Lima Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir di dalam penulisan penelitian ini. Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan. Pada bab ini juga dimasukkan beberapa rekomendasi untuk pihak Pemerintah Kota Padang, tentunya dengan berpijak pada temuan lapangan dan analisa yang sudah dilakukan.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran ini, menurut fungsinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama digunakan untuk memperluas wawasan sebelum turun lapangan dan yang kedua digunakan sebagai alat analisa hasil penelitian. Kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk memperluas wawasan adalah pemaparan mengenai manajemen penanggulangan bencana, sedangkan yang akan digunakan sebagai alat analisa hasil penelitian adalah komponen manajemen penanggulangan bencana khususnya pemulihan.

2.1. Bencana

Menurut UU No. 24 tahun 2007, bencana merupakan Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. John Oliver dalam *Handbook Disaster Research* (2007: 9) mendefinisikan bencana sebagai: “*part of the environmental process that is of greater than expected frequency and magnitude and causes major ‘human hardship with significant damage’*”. (bagian dari proses lingkungan yang lebih besar dari frekuensi yang diharapkan dan penyebab utama ‘kesulitan manusia dengan kerusakan yang signifikan.’)

Sementara itu PBB Mendefinisikan bencana sebagai :“*a serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses which exceed the ability of the affected society to cope using only its own resources*” (UN, 1992). (gangguan fungsi masyarakat yang serius yang menyebabkan kerugian bagi manusia, kerugian material atau kerusakan lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak dimana cara untuk mengatasi kerusakan tersebut hanya dengan menggunakan sumber daya itu sendiri.)

Sedangkan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2008) bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori : bencana alam atau lingkungan dan bencana yang terjadi karena ulah manusia atau ciptaannya (teknologi), (Gustin, 2005: 61). Bencana alam meliputi seperti angin puyuh, tornado, banjir, serta gempa bumi. Sementara contoh lain dari bencana yang disebabkan oleh ulah manusia atau insiden teknologi meliputi kecelakaan material, kecelakaan radiologi, kecelakaan transportasi, peledakan bom serta kegagalan listrik.

2.2. Gempa Bumi

BNPB menjelaskan *Gempa bumi* merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Penyebab Terjadinya Gempa Bumi (BNPB, 2008) :

1. Proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi
2. Aktivitas sesar di permukaan bumi
3. Pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuh tanah
4. Aktivitas gunung api
5. Ledakan Nuklir

Adapun Joseph F. Gustin (2005: 67) mendefinisikan gempa bumi sebagai: “*An earthquake is a sudden, rapid shaking of the earth caused by the breaking and shifting of rock beneath the earth’s surface.*” (gempa bumi merupakan guncangan bumi yang sangat hebat yang disebabkan oleh patahan dan pergeseran batuan di bawah permukaan bumi.)

Mekanisme kerusakan terjadi karena energi getaran gempa dirambatkan ke seluruh bagian bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan runtuhnya bangunan sehingga dapat menimbulkan korban jiwa.

Getaran gempa juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuh batuan, dan kerusakan tanah lainnya yang merusak permukiman penduduk. Gempa bumi juga menyebabkan bencana ikutan berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi serta banjir akibat runtuhnya bendungan maupun tanggul penahan lainnya (Gustin, 2005: 68).

2.3. Manajemen Penanggulangan Bencana

Menurut Departemen Sosial RI, Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Sementara menurut UU Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi

Secara umum kegiatan manajemen penanggulangan bencana dapat dibagi kedalam tiga kegiatan utama (Coppola, 2007), yaitu:

1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini
2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;
3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan didalam

menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana (Schneid dan Collins, 2001).

Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanya begitu banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadi efisiensi (Higgins dalam Linda dan Donald, 2005: 65).

Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidah-kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi. (Schwab, 1998)

2.4. Pendekatan Manajemen Penanggulangan Bencana

Manajemen bencana yang komprehensif didasarkan pada empat komponen: *mitigasi, kesiapsiagaan, cepat tanggap dan pemulihan* (Coppola, 2007: 8). Meskipun berbagai terminologi sering digunakan dalam menggambarkan empat hal tersebut, manajemen bencana secara efektif memanfaatkan setiap komponen dalam cara berikut:

1. Mitigasi

Merupakan usaha-usaha untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya. Mitigasi berusaha untuk "mengobati" bahaya yang mempengaruhi masyarakat untuk tingkat yang lebih rendah. Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen

bencana. Sesuai dengan tujuan utamanya yaitu mengurangi atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan penjinakan/peredaman. Dapat dikatakan bahwa mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bahaya untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.

2. Kesiapsiagaan

Merupakan usaha-usaha untuk memperlengkapi orang-orang yang mungkin terkena dampak oleh bencana atau yang mungkin dapat membantu mereka yang terkena dampak dengan alat untuk meningkatkan kesempatan mereka untuk bertahan hidup dan untuk meminimalkan kerugian keuangan dan lainnya. Jika melihat pengertian diatas, kesiapsiagaan merupakan sebuah aksi dalam menghadapi bencana yang dilakukan untuk menghadapi respon dan konsekuensi dari terjadinya sebuah bencana. Kesiapsiagaan berbeda dengan mitigasi, walaupun kedua tahapan tersebut beradapa dalam ruang lingkup yang sama yaitu, pra bencana. Yang membedakan adalah bahwa kesiapsiagaan merupakan tindakan dimana setiap individu akan yang terkena bencana mengetahui apa yang harus dikerjakan sebagai tindakan utama dalam menghadapi bencana. Semetara mitigasi merupakan persiapan atau usaha yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana.

3. Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang digunakan dgn segera pada saat kejadian bencana utk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

4. Pemulihan

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

2.5. Upaya Pemulihan (*Recovery*) Pasca Bencana

Haas, Kates dan Bowden (1977) dalam *Handbook Of Disaster Research* mendeskripsikan upaya pemulihan sebagai :

“Early definitions of recovery emphasized that recovery was predictable, made up of identifiable parts occurring in a sequential manner; choices and decisions were value driven; and outcomes (i.e., paths to recovery) emphasized a return to normalcy or the incorporation of those actions that have become more recently associated with sustainability—a reduction of future vulnerability (post-disaster mitigation), equity, and amenity.”

“Definisi awal pemulihan menekankan bahwa pemulihan yang dapat diprediksi terdiri dari bagian yang dapat diidentifikasi terjadi secara berurutan, pilihan dan keputusan ditentukan oleh nilai dan hasil (misalnya, jalur untuk pemulihan) yang ditekan kembali ke kondisi normal atau penggabungan tindakan yang telah menjadi lebih baru yang terkait dengan reduksi keberlanjutan kerentanan di masa depan (pasca-bencana mitigasi), ekuitas, dan kemudahan.” (Haas, Kates, dan Bowden, 1977, p. xxvi)

Sementara itu Damon P. Coppola (2007: 299) dalam bukunya mendefinisikan upaya pemulihan sebagai : *“Disaster recovery is the emergency management function by which country, communities, families, and individual repairs, reconstruct, or regain what has lost as a result of disaster. Ideally reduce the risk of catastrophe in the future.”* (Pemulihan bencana merupakan fungsi dari manajemen bahaya yang dilakukan oleh negara, dimana setiap komunitas, keluarga dan memperbaiki individu, merekonstruksi atau mendapatkan kembali apa yang hilang ketika bencana terjadi. Idealnya, mengurangi resiko dari kejadian yang sama ketika bencana tersebut terjadi lagi di masa yang akan datang.)

Dalam sistem manajemen darurat yang komprehensif, yang meliputi perencanaan pra bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan tindakan pemulihan dapat dimulai sedini selama kegiatan perencanaan, jauh sebelum bencana terjadi. Setelah terjadi bencana, tindakan pemulihan terencana dan tidak terencana harus dilaksanakan dan mungkin diperpanjang selama berminggu-minggu, bulan dan bahkan bertahun-tahun (Gustin, 2005: 18). Pada kenyataannya, upaya pemulihan merupakan langkah yang sulit dan tidak tentu, termasuk informasi, semuanya memiliki peran dalam upaya pemulihan di masyarakat. Tindakan yang terkait dengan pemulihan bencana merupakan yang paling beragam dari semua fungsi manajemen bencana. Cakupan individu, organisasi dan kelompok yang terlibat juga lebih besar daripada di fungsi lain. Akibat dari sifat luar biasa sebuah bencana dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang, upaya pemulihan dapat menarik perhatian masyarakat dunia secara keseluruhan. Sehubungan dengan fungsi-fungsi manajemen bencana lain, fungsi pemulihan adalah yang paling memakan biaya. Pemulihan bencana juga setidaknya dipelajari dan paling terorganisir dari semua fungsi manajemen bencana, dan karena itu yang paling penting untuk dilakukan. Pemulihan melibatkan lebih dari sekedar mengganti apa yang ada. Ini adalah proses yang kompleks, terkait erat dengan tiga fase lain dari manajemen bencana dan membutuhkan jumlah besar perencanaan, koordinasi dan pendanaan. (Barry, 1997)

Bagian yang paling penting dalam upaya pemulihan adalah termasuk rekonstruksi fisik dalam sebuah pembangunan lingkungan. Contoh spesifiknya meliputi membangun dan memperbaiki bangunan yang rusak, rumah, kawasan perniagaan, sarana publik, seperti taman, gedung umum, dll. Dalam masa pemulihan, pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat vital dalam menentukan seberapa cepat daerah tersebut bisa pulih. (Geis, 2000: 151-160)

Adapun Aksi dan kegiatan umum dilakukan pada periode pemulihan bencana menurut Coppola (2007: 299) meliputi:

1. Komunikasi dengan masyarakat
2. Penyediaan perumahan sementara atau tempat berteduh jangka panjang
3. Pengkajian kerusakan dan kebutuhan
4. Pembongkaran struktur kerusakan

5. Pembersihan, penghapusan, dan pembuangan puing
6. Rehabilitasi infrastruktur
7. Pemeriksaan kerusakan struktur
8. Perbaikan kerusakan struktur
9. Konstruksi baru
10. Program rehabilitasi Sosial
11. Penciptaan kesempatan kerja
12. Penggantian kerugian properti
13. Rehabilitasi terluka
14. Pengkajian kembali manajemen risiko

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan aspek penting dalam setiap upaya pemulihan, niscata setiap kegiatan tersebut mempunyai peranan yang sangat berarti bagi perbaikan kehidupan masyarakat pasca bencana.

Pada kenyataannya, upaya pemulihan bencana merupakan aspek paling sedikit dipahami manajemen darurat, dari sudut pandang komunitas peneliti dan praktisi. Bila dibandingkan dengan fase lain yang diakui secara luas oleh manajemen darurat, yaitu kesiapsiagaan, respon dan mitigasi, para ahli belum menjawab pertanyaan mendasar, sementara praktisi telah gagal membangun suatu kerangka kebijakan terpadu atau memanfaatkan alat tersedia untuk meningkatkan hasil pemulihan bencana (Berke, Kartez, dan Wenger, 1993).

Beberapa definisi pemulihan telah difokuskan pada perbaikan dan pemulihan pembangunan lingkungan serta diferensiasi temporal antara pemulihan jangka pendek dan jangka panjang atau rekonstruksi, termasuk penghargaan tindakan pra-bencana seperti penggunaan lahan dan perencanaan pemulihan. Pemulihan melibatkan lebih dari rekonstruksi lingkungan binaan. Dengan demikian, definisi alternatif pemulihan bencana adalah salah satu yang menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi oleh orang-orang dan dampak bencana pada konstruksi yang dibuat oleh manusia serta keterangan tentang bagaimana sistem alam yang terkena dampak dan "pulih" dari bencana. Oleh karena itu disarankan bahwa pemulihan bencana dapat didefinisikan sebagai proses diferensial untuk memulihkan, membangun kembali, dan membentuk

kembali lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan alam melalui perencanaan. (Rubeen dan Barbee, 1985; Schwab, 1998). Akibatnya, orang-orang, kelompok, organisasi, masyarakat, pemerintah, ekonomi, dan lingkungan sering pulih pada tingkat yang berbeda, dan dalam beberapa kasus gagal mencapai kondisi pra-bencana mereka. Sebaliknya, ada peluang untuk pulih dengan cara perbaikan atas kondisi-kondisi yang lazim (sosial, ekonomi, dan lingkungan) sebelum terjadinya bencana.

Adapun tipe-tipe *recovery* (pemulihan) dapat dibedakan menjadi *Public Assistance, Housing Sector, Economic Recovery* dan *Individual, Family and Social Recovery* (Coppola, 2007: 315).

1. *Public Assistance*

Bantuan publik merupakan salah satu tipe dari upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemulihan ini meliputi semua aspek yang hancur dari ranah publik atau sarana umum. Secara umum, tipe ini mencakup seperti struktur, sistem dan pelayanan yang berhubungan dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam memproteksi ketiga hal tersebut, disamping itu faktor lingkungan juga termasuk kedalam kategori ini. Di negara lain pada umumnya, sarana umum biasanya dikelola dan dipelihara dengan baik. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai perbaikan dan perawatan sarana tersebut.

Kebanyakan dari bencana menghasilkan puing dalam jumlah yang banyak seperti pohon tumbang, lumpur, reruntuhan batu-batu, puing-puing bangunan, properti yang berbahaya dari sisa-sisa kendaraan bermotor serta material lainnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk membereskan dan memindahkan seluruh puing-puing yang dihasilkan oleh bencana tersebut. Yang selanjutnya mereka harus mampu membersihkan wilayah yang dilanda bencana dari segala macam material puing sisa bencana yang biasanya melibatkan pihak swasta, karena biasanya pemerintah sering kewalahan dalam menghadapi itu semua.

Pada akhirnya adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi bencana yang berkaitan dengan lingkungan yang cenderung dapat menimbulkan penderitaan

pada masyarakat. Apabila pemerintah gagal, hal itu dapat mengakibatkan bertambahnya resiko bencana di masa depan.

2. *The Housing Sector*

Perumahan di seluruh daerah yang terkena dampak akan menunjukkan perbedaan tingkat kerusakan dan kehancuran karena komposisi, lokasi, elevasi, dan kedekatan dengan bahaya, serta beberapa faktor lainnya. Prioritas utama pemerintah adalah untuk mensuplai inspektur perumahan yang mampu mendeterminasi struktur mana yang harus diperbaiki atau struktur mana yang harus dihancurkan dan yang mana yang tidak perlu dikerjakan sama sekali. Apabila pembangunan sektor perumahan dalam rangka upaya pemulihan bencana ditunda, niscaya hal tersebut akan menyebabkan tertundanya seluruh dimensi pemulihan (Bolin, 1986). Pada umumnya tidak akan ada jumlah inspektur perumahan yang mencukupi untuk mengemban tugas ini, maka dari itu asstien dari luar dibutuhkan jika memungkinkan.

Biaya aktual dari perbaikan kontruksi rumah tersebut tergantung dari pemilik rumah tersebut. Biasanya, korban yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah tidak mampu membiayai perbaikan rumahnya. Maka dari itu mereka beralih untuk mencari bantuan dari luar. Sayangnya, bantuan tersebut tidak selalu tersedia seperti yang terjadi di Mexico City pasca gempa tahun 1985, dimana para korban gempa tidak memiliki rumah secara permanen selama 15 tahun setelah gempa tersebut terjadi. Rekonstruksi perumahan yang paling sukses terjadi ketika hal itu dilaksanakan dengan masukan dari populasi resipien (Vale dan Campanella, 2005: 255). Perbaikan sektor perumahan, tergantung dari sumber keuangan untuk membangun kembali perumahan tersebut. Perumahan dibangun oleh sumber daya dari dalam masyarakat, yang bertentangan dengan kontraktor eksternal, cenderung mengurangi biaya dan lebih diterima oleh penerima. Hal itu juga menjamin bahwa bantuan dana tetap dalam ekonomi lokal. (Bolin dan Stanford, 1991)

Korban yang mampu memperbaiki kondisi rumahnya dengan sesegera mungkin akan melakukannya secepat yang ia bisa. Untuk membuat rumah baru atau memperbaiki rumah yang rusak dengan cepat, tentu saja dibutuhkan semangat, selain itu mereka juga harus yakin bahwa rumah yang akan dibangun atau diperbaiki harus

mempunyai struktur yang lebih baik atau setidaknya apabila kejadian serupa terulang rumah tersebut mampu bertahan (Pettersen, 1999). Untuk mengatasi masalah ini, seorang perencana harus mengidentifikasi dengan cepat area mana yang bisa untuk direkonstruksikan, mana yang membutuhkan rekayasa ulang dan mana yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Untuk daerah yang berisiko tinggi terhadap pembangunan kawasan perumahan setelah bencana sebaiknya meninggalkan rencana tersebut dan mencari daerah alternative yang lebih aman untuk membangun rumah mereka kembali.

3. *Economic Recovery*

Bencana memberikan tekanan yang hebat kepada ekonomi lokal dan nasional. Bahkan pada bencana yang sangat hebat, tidak jarang menimbulkan gejolak pada perekonomian dunia. Kehilangan pekerjaan, kehilangan faktor produksi, kehilangan kesempatan bisnis serta pengeluaran pemerintah yang sangat besar merupakan beberapa dampak bencana terhadap kejatuhan kondisi ekonomi yang harus dikembalikan sesegera mungkin agar kembali stabil. Ekonomi lokal individu ditopang oleh faktor dimana termasuk didalamnya adalah pariwisata, pertambangan, pabrik produksi, pertanian, kerajinan tangan serta pendidikan. Masyarakat tumbuh dan berkembang serta menjadi mandiri tergantung kepada industry yang disebutkan tadi, dan penduduk kota membutuhkan skill untuk menjalankan industri tersebut. Industri pendukung dan pelayanan seperti transportasi, komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayaran akan ikut berkembang seiring dengan industri pokok tersebut. Pada dasarnya, upaya pemulihan di bidang ekonomi harus diawali dengan pembangunan kegiatan industri tersebut.

Mengembalikan ekonomi lokal harus menjadi prioritas utama dalam pemuliahan ekonomi bagi para perencana. Hal itu sangat vital karena bisnis lokal kembali ke dalam kapasitas penuh khususnya dalam periode awal upaya pemulihan (Rittinghouse dan Ransome, 2005: 171). Apabila bisnis lokal tidak mampu untuk memanfaatkan keuangan dari hal tersebut maka penanaman modal asing yang akan meraih keuntungan dari kondisi tersebut. Apabila pendanaan dan investasi dalam jumlah besar mampu dikumpulkan di periode awal dalam upaya pemulihan, maka hal

itu akan memungkinkan untuk mengembalikan kondisi ekonomi dengan cara memperbaiki kondisi infrastruktur yang sudah ada sebelumnya. Semua kerusakan yang menimpa seperti sarana komunikasi, akses internet dan peralatan-peralatan lainnya harus dapat diperbaiki dan mengacu kepada standart yang modern, oleh karena itu secara keseluruhan potensi ekonomi lebih besar daripada kondisi sebelum bencana.

Sebagus apa sebuah masyarakat melakukan upaya pemulihan cenderung untuk mengikuti secara langsung sebaik apa masyarakat tersebut melakukan kegiatan ekonomi sebelum bencana terjadi. Kegiatan ekonomi yang berlangsung dengan sukses sebelum bencana terjadi, jauh lebih mungkin untuk memiliki cadangan untuk membawa mereka untuk melalui kondisi upaya pemulihan terburuk yang dioperasikan dalam tepi jurang kebangkrutan meskipun itu terjadi sebelum adanya bencana. Masyarakat yang sukses lebih mungkin untuk memiliki kebanggaan sipil dan kekompakkan untuk secara bersama-sama bergerak maju dan bahkan melebihi tingkat kesejahteraan pada saat sebelum bencana terjadi sementara masyarakat yang gagal tentu saja akan membuat tingkat kesejahteraan setelah bencana akan menjadi lebih buruk.

Pengangguran adalah salah satu konsekuensi umum akibat dari sebuah bencana. Kehilangan pekerjaan datang sebagai pukulan ganda kepada korban yang tidak hanya harus berenang ke dalam tabungan mereka dan mungkin harus mendukung keluarga mereka dalam jangka pendek tetapi juga berusaha untuk menutup kerusakan rumah dan property mereka. Korban yang tidak bekerja lebih mungkin untuk bertahan dengan tangan kosong dari pada membeli barang-barang di pasar lokal yang mungkin akan membuat lemah ekonomi lokal.

Kualitas dari rencana dan koordinasi upaya pemulihan akan mempengaruhi pekerja dalam beberapa cara. Pertama, hanya ketentuan yang efisien dari pelayanan upaya pemulihan termasuk distribusi bantuan akan memperbolehkan waktu penduduk untuk mendedikasikan pekerjaan. Distribusi bantuan yang burukakan menyebabkan korban menunggu atau barbaris dalam antrian selama berjam-jam dan menghambat mereka untuk mencari pekerjaan. Kedua, korban harus disediakan sarana untuk menerima pekerjaan yang akan buat seperti pelatihan, transportasi atau bantuan

aplikasi. Para pekerja harus mempertimbangkan komitmen ekstra yang mana mungkin dimiliki oleh korban diluar pekerjaan seperti membangun kembali rumah mereka, meyakinkan bahwa anak mereka pergi ke sekolah atau memiliki hari-hari yang memadai dan mungkin menghadiri pertemuan medis.

Banyak bisnis yang berimbas kepada bencana secara umum akan menemukan kegagalan sebagai hasil dari kerugian jangka panjang. Hal ini khususnya terjadi pada bisnis yang kecil. Statistik di Amerika menunjukkan bahwa 25% bisnis kecil terpaksa gulung tikar akibat dari kerugian yang disebabkan oleh bencana dan tidak pernah membuka usahanya kembali dan 40-60% bisnis kecil lainnya tutup secara permanen setelah bertahan selama dua tahun setelah bencana. Pemulihan pendanaan dapat mengatasi masalah ini dan menahan pekerjaan yang mungkin saja bisa hilang.

4. *Individual, Family and Social Recovery*

Pemulihan pada masyarakat berkaitan erat dengan kesehatan fisik dan mental dalam diri individu, keluarga dan grup sosial (Marsella, Johnson, Watson dan Gryczynski, 2008: 47). Meskipun gedung-gedung, rumah dan komponen infrastruktur lainnya sudah diperbaiki, masyarakat akan tetap menderita sampai kebutuhan sosial mereka terpenuhi. Ketika kebutuhan ini ada dalam setiap bencana, tingkat kebutuhan akan meningkat secara bertahap seiring dengan jumlah korban cedera dan meninggal. Upaya pemulihan dari kondisi darurat sosial kemanusiaan yang kompleks, di mana gangguan keamanan penuh juga cenderung terjadi, seringkali membutuhkan perhatian yang cukup.

Tanpa memperhatikan tingkat kehilangan ataupun cedera, seluruh masyarakat di dalam wilayah yang terkena bencana akan menghadapi stress emosional dan kegelisahan dalam tingkat yang tinggi. Bencana merupakan hal yang dapat membuat manusia menjadi stress dan membuat masalah karena hal itu memaksa manusia untuk melawan bahaya dan mungkin membuat masyarakat berasumsi bahwa bencana itu menghancurkan. Mereka yang cedera, kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal menjadikan ini sebagai pengalaman untuk tingkat yang lebih tinggi. Kehidupan mereka menjadi terganggu dan menjadi dislokasi dan mungkin saja masa depan mereka menjadi hancur. Penelitian

mengatakan bahwa anak-anak yang tertimpa bencana sangat rentan terhadap emosional stress. Cacat fisik merupakan masalah lain yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Pertama, Bencana yang mengakibatkan orang cedera dapat menyebabkan bertambahnya kebutuhan mengenai rehabilitasi fisik melebihi dampak yang ditangani oleh masyarakat. Kedua, mereka yang sebelumnya sudah mengalami cacat fisik sebelumnya akan merasakan kerugian yang sangat besar ketika panti sosial dimana mereka bernaung sebelumnya menjadi hancur atau rusak akibat bencana. Berikut merupakan hasil yang diakibatkan oleh bencana yang berimbas kepada cacat fisik dan disabilitas (WHO, 2005):

- a. Untuk korban yang sudah mengalami disabilitas sebelum terjadi bencana
 - i. Dibandingkan dengan mereka yang tidak cacat, orang yang mengalami cacat fisik lebih beresiko ketika menghadapi bencana.
 - ii. Banyak orang cacat yang kehilangan alat bantu seperti alat bantu jalan (tongkat), kruk, alat bantu dengar dan kacamata
 - iii. Orang cacat dapat memperoleh kesulitan yang besar dalam mengakses kebutuhan seperti air, makanan, pelayanan kesehatan, perumahan dan MCK
 - iv. Rehabilitasi infrastruktur dapat mengalami kerusakan atau gangguan dan rehabilitasi personil termasuk pengasuh utama, mungkin saja terbunuh cedera atau dialihkan kepada tugas yang lain.
- b. Untuk korban yang mengalami disabilitas akibat bencana
 - i. Tidak memadainya pengobatan pada korban bencana yang mengalami patah tulang dan luka infeksi dapat mengakibatkan kecacatan dalam jangka waktu tertentu atau bahkan permanen.
 - ii. Rujukan kepada korban untuk memperoleh fasilitas pelayanan pengobatan menjadi sulit atau bahkan menjadi mustahil.
 - iii. Dapat terjadinya kelangkaan personil pelayanan kesehatan dan rehabilitasi lokal untuk menangani orang-orang yang baru saja mengalami cacat fisik akibat gempa.
 - iv. Mereka yang terluka, akan mengalami kerugian yang berbeda-beda dalam menerima dan bantuan pemulihan apabila dibandingkan dengan mereka

yang tidak terluka, dan mungkin akan memperoleh resiko yang lebih besar dalam mengembangkan kesehatan mental.

5. *Cultural Recovery*

Setelah bencana, masyarakat seringkali menemukan warisan mereka hancur. Bangunan bersejarah dan stuktur lainnya, seni, pakaian dan tradisi hilang. Kehilangan dari komponen budaya seperti ini dapat menyebabkan hilangnya identitas masyarakat yang sekarang menjadi tinggal dan menggunakan dalam bangunan yang tidak menunjukkan kebutuhan budaya mereka. Mereka mungkin saja menggunakan pakaian yang di donasikan oleh donator yang tidak formal untuk mereka dan makan makanan yang tidak biasanya mereka makan. Sangat penting untuk memahami nilai-nilai budaya untuk menentukan langkah pemulihan seperti apa yang tepat untuk diterapkan di wilayah tersebut (Marsella, Johnson, Watson dan Gryczynski, 2008: 48)

2.5.1. *Komponen Recovery*

Periode yang paling lama dalam upaya pemulihan dari bencana yang dahsyat membutuhkan beberapa pasokan kebutuhan. Setiap kategori kebutuhan bergantung satu sama lain dan apabila ada kebutuhan yang terputus, maka hal itu akan berdampak kepada kebutuhan lainnya. Adapun komponen dari upaya pemulihan ini adalah (Coppola, 2007: 302):

1. Perencanaan

Perencanaan setelah bencana terjadi adalah suatu tindakan yang sangat jauh berbeda yang berdampak kepada lingkungan dengan perencanaan sebelum terjadinya bencana. Langkah penting yang dapat dilakukan dalam perencanaan ialah mengkonduksikan survey dasar dengan analisa bahaya sehingga dapat menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan. Hal penting lainnya dalam perencanaan untuk upaya pemulihan adalah adanya upaya perbaikan konstruksi atau aksi-aksi lainnya yang dapat bertahan lama yang dapat menopang kehidupan masyarakat (Gustin, 2005: 147). Salah satu opsi yang dapat membantu manajer bencana seperti memberlakukan penagguhan pada kontstruksi baru. Dalam memulai sebuah

perencanaan, diharuskan mengembangkan sebuah peta kerusakan atas dampak bencana tersebut. Biasanya dimulai dari dua atau tiga hal yang paling mendesak untuk dilakukan (Gregory, 2008: 13).

William Spangle (1991) menjabarkan dua langkah yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh perencana untuk melakukan proses perencanaan:

- a. Perencanaan dan pembangunan kembali dapat terjadi secara serentak, beberapa pembangunan kembali dapat dilaksanakan sebelum rencana utama dapat diselesaikan. Meskipun penundaan pembangunan kembali dirasa tepat setelah bencana, mempersingkat prosedur pengambilan keputusan harus diselesaikan dengan baik. Secepatnya, pekerja lokal perlu untuk menentukan area mana saja yang dapat di bangun kembali dengan rencana dan regulasi yang telah disusun.
- b. Setelah bencana, perencana biasanya memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk perluasan tata kota dengan menghindari lahan yang tidak aman. Apabila daerah tersebut dapat ditemukan dengan cepat, perencana dapat mempercepat upaya relokasi korban bencana dan perdagangan dari kerusakan parah.

Meskipun beberapa manajer bencana menghadapi upaya pemulihan pasca bencana tanpa rencana, mereka tidak perlu takut. Rencana dan regulasi yang sudah ada dapat diterima di beberapa bagian kota, khususnya dimana banyak bangunan hancur karena mereka tidak di disain secara modern. Sebagai tambahan, meskipun usaha terbaik sudah dilakukan oleh manajer untuk melakukan apa yang sudah direncanakan secepat yang dia bisa, ada beberapa konstruksi yang tidak bisa dikerjakan secara cepat. Bangunan yang sudah ada sebelumnya dan pengembangan rencana, peraturan penetapan wilayah, peraturan untuk memilih tempat tinggal dapat membantu kelompok yang terpisah dari beberapa komponen yang terlibat. (Clarke, 1999)

2. Koordinasi

Haas dan Drabek (1973) dalam *Handbook of Disaster Research* mendefinisikan koordinasi sebagai: “*Those sets whose behaviors through which the complex network of interrelated events are maintained.*” (Suatu ketetapan dimana perilaku melalui hubungan yang kompleks saling berkaitan satu sama lain yang terjaga dengan baik).

Koordinasi ketika melakukan proses upaya pemulihan merupakan hal yang sulit untuk dicapai, tetapi hal tersebut sangat vital untuk mensukseskan tujuan dari upaya pemulihan disamping mengurangi resiko yang ada. Kesuksesan dari koordinasi upaya pemulihan pasca-bencana tergantung kepada kemampuan perencana untuk mencapai gambaran secara luas dalam struktur koordinasi (Schneid dan Collins, 2001: 39). Dalam melakukan koordinasi, dibutuhkan komunikasi dua arah yang baik antara pihak penerima dan pengirim. Tanpa kedua hal tersebut, koordinasi yang baik tidak akan tercapai. Komunikasi yang baik membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemulihan berlangsung aman (Gustin, 2005: 46). Rencana pemulihan yang digunakan untuk mengatasi demografi masyarakat dan kebutuhan kultur sosial, semua golongan masyarakat harus dilibatkan, termasuk pemuka agama, organisasi sipil, pihak swasta, pemerintah, dan media. Hal itu memungkinkan adanya interaksi antara pihak lokal dan regional atau mungkin internasional melalui proses pemulihan, sehingga penyertaan dari pihak-pihak tersebut menjadi sangat vital.

Menurut Petterson (1999), dengan melibatkan pihak-pihak yang sudah disebutkan diatas, upaya pemulihan yang terorganisir dengan baik dapat memungkinkan terjaminnya banyak hal yang dipelajari, pelatihan terbaik dan efisiensi buruh dapat berjalan secara maksimal. Dengan ketiadaannya koordinasi dan komunikasi yang baik, upaya pemulihan menjadi tidak mungkin untuk menjangkau kebutuhan di tingkat lokal.

Apabila struktur yang terbentuk sudah benar, hasil dari mekanisme koordinasi akan menjadi tempat penyimpanan informasi dan bantuan untuk semua kelompok ataupun individu yang terlibat. Struktur tersebut dapat dibentuk dari masyarakat sekitar atau pemerintah yang terlibat atau dari komite perwakilan. Adapun petugas yang terlibat dalam struktur koordinasi pemuliahan adalah (Coppola, 2007: 304):

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Petugas lingkungan | 10. Organisasi lokal darurat |
| 2. Manager banjir | 11. Direktur taman rekreasi |
| 3. Petugas bangunan | 12. Perwakilan publik |
| 4. Petugas pengembangan ekonomi | 13. Palang merah |
| 5. Petugas keuangan | 14. Konstruksi dan Pengembangan |
| 6. Petugas transportasi | 15. Asosiasi rumah tangga |
| 7. Petugas perumahan | 16. Organisasi keagamaan |
| 8. Organisasi lingkungan | 17. Agensi pelayanan sosial |
| 9. Organisasi perencanaan regional | |

Otoritas hukum harus diberikan kepada kelompok tersebut untuk menjamin bahwa mereka memiliki kekuatan yang memadai untuk melakukan aksi dan rekomendasi mereka. Adapun fungsi dari struktur tersebut (Coppola, 2007: 304) :

1. Mengkaji dan menyusun daftar kebutuhan
2. Menjaga dan memfasilitasi proses rencana upaya pemulihan
3. Membuat tujuan upaya pengurangan resiko
4. Memusatkan informasi bantuan dan sumber daya upaya pemulihan
5. Meminimalisir hal-hal yang tidak efisien dalam pelayanan
6. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi pada korban

Dibeberapa negara berkembang, dimana pengetahuan, pengalaman dan keahlian dibutuhkan untuk menjalankan rencana pemuliahan, kadangkala tidak ada di setiap tingkat pemerintahan, koordinasi eksternal bisa menjadi alternatif. Secara umum, organisasi seperti PBB yang mempunyai hubungan dengan hampir seluruh pemerintahan negara di dunia akan beramsumsi seperti sebuah peran.

Terputusnya hubungan yang sering terjadi dalam perencanaan dan koordinasi upaya pemulihan seringkali berasal dari pemahaman yang tidak akurat mengenai apa yang terbaik bagi masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan pembagian tugas dalam mengerjakan upaya pemulihan (Gregory, 2008: 227). Petugas negara, perwakilan organisasi multilateral, dan organisasi non profit baik lokal maupun asing, semua mungkin bekerja dibawah asumsi bahwa walaupun mereka berpendidikan dan

mempunyai informasi yang luas belum tentu tepat untuk melakukan proses pemulihan dalam menentukan kondisi sosial dan budaya yang spesifik di lapangan.

3. Pengkajian Kerusakan

Sebelum rencana upaya pemulihan yang efektif memungkinkan untuk dilakukan, manager bencana harus memiliki akses untuk mengakurasi mengenai informasi kerusakan yang terjadi. Hal ini akan membantu mengidentifikasi strategi yang paling baik untuk mempekerjakan sumberdaya yang memungkinkan dan prioritas aksi yang harus dilaksanakan. Pengkajian kerusakan dapat membantu perencana untuk mengidentifikasi jumlah dan tipe bangunan yang hancur ataupun rusak (Gustin, 2005: 11). Selama proses perencanaan upaya pemulihan, pengkajian ini akan bertindak sebagai panduan utama untuk menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian dan dalam prioritas yang seperti apa serta bagaimana mendistribusikan sumberdaya yang ada secara efektif. Hal ini diperlukan untuk mendukung proses pemulihan sebagai sebuah sistem. Sistem ini lah yang nantinya akan menentukan seberapa cepat proses pemulihan itu berlangsung. (Gregory, 2008: 90) Sayangnya, pengkajian yang dihasilkan pada fase respon tidak akan mengandung semua unsur informasi yang dibutuhkan oleh perencana, khususnya ketika mereka bermaksud untuk mengurangi resiko pada bencana yang akan datang.

Pengkajian selanjutnya akan memungkinkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan pengkajian tersebut perlu untuk dilakukan oleh berbagai bidang ahli untuk menentukan kebutuhan pemulihan yang aktual. Sebagai contoh, dibebberapa kasus inspeksi teknis dari kerusakan bangunan perlu untuk dilakukan dalam rangka menentukan apakah perlu untuk dihancurkan, diperbaiki dan mana yang perlu dikerjakan sesegera mungkin. Perencana upaya pemulihan, akan membutuhkan peninjauan ulang secara berkala area yang terkena bencana untuk menentukan jangka waktu yang dibutuhkan dalam memulihkan daerah tersebut. Dalam upaya pengkajian ini, segala jenis sumberdaya perlu dialokasikan kembali dan dicari masalah-masalah yang ada sebelum terlambat untuk memperbaikinya. Dengan mekanisme koordinasi yang baik dan memaksimalkan jumlah organisasi yang bertasipasi, upaya pengkajian akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

4. Uang dan Perlengkapan

Tanpa dana yang mencukupi, akan sulit untuk memulihkan suatu wilayah yang terkena bencana meskipun banyak relawan lokal dan internasional memberikan bantuan peralatan serta perlengkapan. Investasi keuangan dalam rekonstruksi suatu komunitas sangat dibutuhkan untuk memenuhi target upaya pemulihan seperti memperbaiki dan membangun kembali bangunan yang hancur, memulai kembali perekonomian ataupun kegiatan lainnya. Tanggung jawab mengenai dana rekonstruksi ditentukan oleh berbagai macam sektor dalam komunitas (Rittinghouse dan Ransome, 2005: 13).

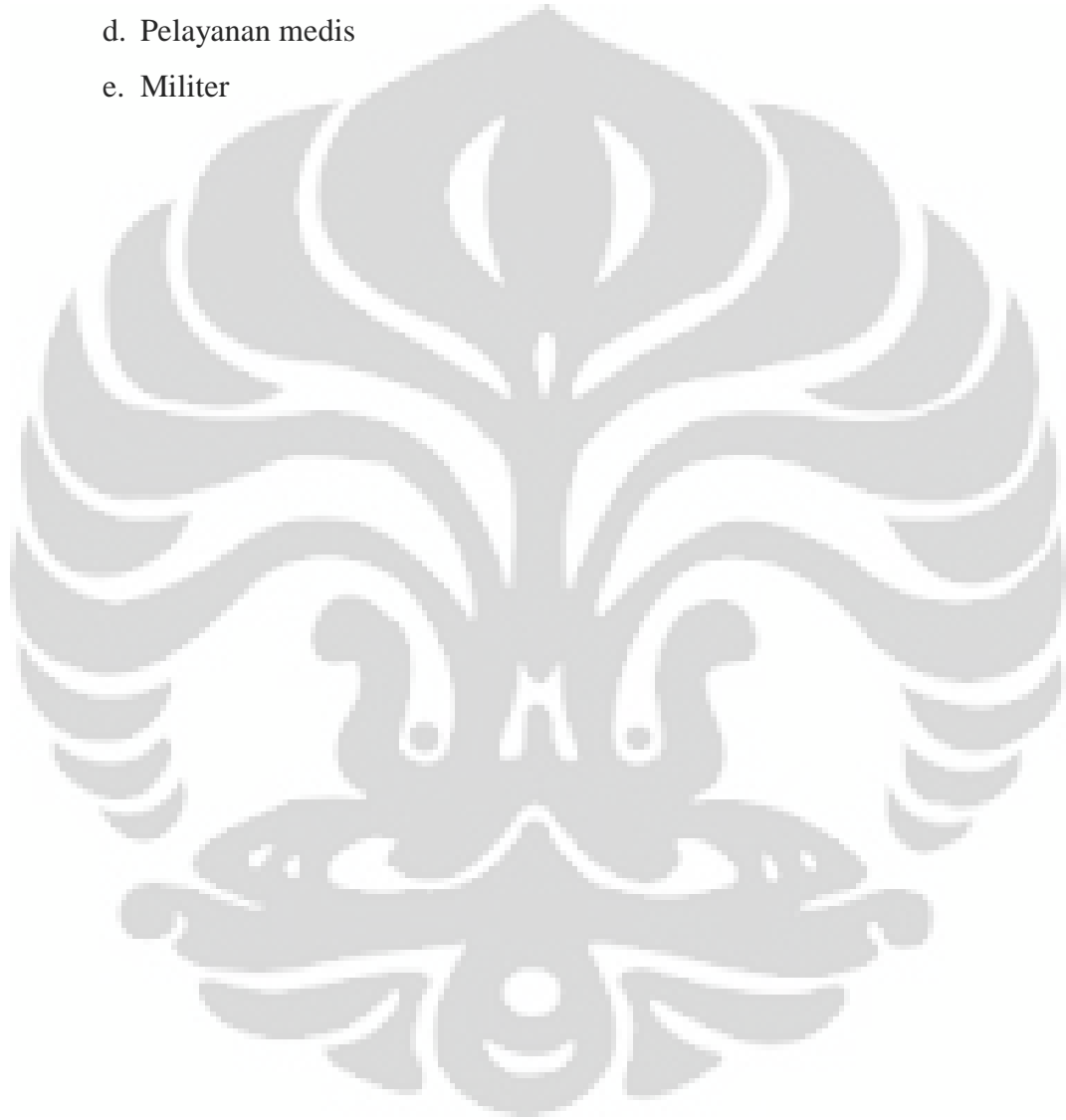
Pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab secara umum dalam membangun kembali fasilitas umum. Pihak swasta termasuk industri, individu dan keluarga akan berada di garis depan dalam membangun kembali sektor perumahan perdagangan, meskipun pemerintah turut mempunyai andil dalam hal tersebut. Sektor publik dan swasta akan bekerja sama dan saling berbagai mengenai dana rekonstruksi. Seberapa cepat negara yang terkena bencana mampu mengorganisir keuangan dan sumber-sumber lainnya akan menentukan seberapa cepat dan seefektif apa negara tersebut melakukan upaya pemulihan atas terjadinya suatu bencana. Seberapa cepat negara yang terkena bencana dapat mengkoordinir faktor keuangan dan sumber-sumber lainnya akan menentukan seberapa cepat negara tersebut pulih dari bencana tersebut. Sebuah negara mempunyai beberapa pilihan dalam memperoleh keuangan untuk menangani sebuah bencana: asuransi, organisasi keuangan pemerintah, donasi, instansi swasta dan kenaikan pajak.

2.5.2. Peran Pemerintah saat *Recovery*

Sistem dan alat-alat bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk mengatasi bahaya yang terjadi dalam masyarakat cenderung cenderung relatif sama di seluruh dunia. Meskipun setiap organisasi manajemen bencana disetiap negara telah berkembang secara mandiri dari berbagai macam sumber daya, sebagai tambahan globalisasi telah memfasilitasi standarisasi praktek, protocol dan peralatan yang digunakan oleh organisasi manajemen bencana. Adapun komponen pemerintah yang

mempunyai perananan penting dalam setiap managemen penanggulangan bencana ialah (Coppola, 2007: 338):

- a. Departemen kebakaran
- b. Departemen hukum
- c. Manajemen bahaya (proteksi masyarakat)
- d. Pelayanan medis
- e. Militer



BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Letak Geografis

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di pantai Barat Pulau Sumatera pada posisi antara 0° 44' 0" dan 1° 08' 35" Lintang selatan serta antara 100° 05' 05" dan 100° 34' 09" Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 luas Kota Padang yang sebelumnya adalah 694,96 Km² (daratan) atau 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat menjadi 1.414,96 Km² setelah ditambah luas perairan laut 720 Km².

Tabel 3.1. Luas Lahan Per Kecamatan di Kota Padang

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Presentase (%)
1	Bungus Teluk Kabung	100,78	14,50
2	Lubuk Kilangan	85,99	12,37
3	Lubuk Begalung	30,91	4,45
4	Padang Selatan	10,03	1,44
5	Padang Timur	8,15	1,17
6	Padang Barat	7	1,01
7	Padang Utara	8,08	1,16
8	Nanggalo	8,07	1,16
9	Kuranji	57,41	8,26
10	Pauh	146,29	21,05
11	Koto Tangah	232,25	33,42
	Total	694,96	100

Sumber : BPS Kota Padang 2008

Wilayah Kota Padang terbagi dalam 11 kecamatan dan 104 kelurahan dimana Kecamatan Koto Tangah merupakan wilayah kecamatan yang paling luas daratannya yaitu 232,25 Km² atau 33,42 persen dari luas daratan Kota Padang.

Wilayah Kota Padang merupakan perpaduan dari dataran tinggi, dataran rendah serta daerah aliran sungai yang terletak di pantai Barat Sumatera. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerengan lahan rata-rata >40%. Ketinggian wilayah Kota Padang dari permukaan laut juga bervariasi, mulai 0 m dpl - >1.000 m dpl. Wilayah daratan Kota Padang ketinggiannya sangat bervariasi yaitu antara 0 - 1.853 m diatas permukaan laut, dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Wilayah yang memiliki topografi datar adalah 15.715,44 Ha, sedangkan yang bertopografi berbukit /bergelombang ± 5.068,85 Ha.

Tabel 3.2. Tinggi Daerah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ketinggian (MDPL)
1	Bungus Teluk Kabung	0-850
2	Lubuk Kilangan	25-1853
3	Lubuk Begalung	8-400
4	Padang Selatan	0-322
5	Padang Timur	4-10
6	Padang Barat	0-8
7	Padang Utara	0-25
8	Nanggalo	3-8
9	Kuranji	8-1000
10	Pauh	10-1600
11	Koto Tangah	0-1600
	Relung	0-1853

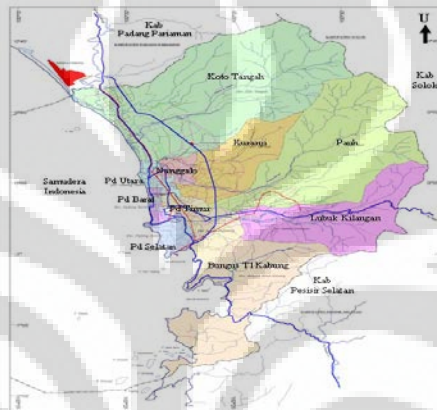
Sumber : BPN Kota Padang Tahun 2008

Kota Padang memiliki kondisi lahan yang beragam, dengan variasi ketinggian dari permukaan yang cukup besar. Sebagian besar wilayah kota ini merupakan hutan lindung yaitu 51,01%, sedangkan bangunan sebanyak 62,88 Km² atau 9,05% serta untuk lahan sawah seluas 52,25 Km² atau 7,52%. Selain wilayah daratan di Pulau Sumatera, Kota Padang juga memiliki 19 buah pulau. Ada tiga pulau yang cukup besar, yaitu Pulau Bintangor seluas 56,78 Ha dan Pulau Sikuai seluas 48,12 Ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung serta Pulau Toran yang termasuk wilayah Kecamatan Padang Selatan. Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 sampai 1.853 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi adalah wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan dan daerah terendah adalah wilayah Kecamatan Padang Barat. Di Kota ini juga terdapat cukup banyak sungai, yaitu lima buah sungai besar dan 16 buah sungai yang kecil. Kelima sungai besar adalah Batang Kandis, Batang Logam dan Sungai Tarung terdapat di wilayah kecamatan Koto Tengah. Sedangkan Batang Kuranji melalui 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pauh, Kuranji, Nanggalo dan Padang Utara. Sedangkan Batang Harau yang memiliki dua muara, juga melalui empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, dan Kecamatan Padang Barat. Panjang pantai 68,129 Km. Temperatur udara berkisar antara 22-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 70-84%. (BPS Kota Padang, 2008)

Dilihat dari tatanan tektonik Kota Padang yang terletak di Pulau Sumatera berada di pertemuan tiga lempeng kerak bumi yaitu Kerak Benua Eurasia, Lempeng Samudera Hindia Australia dan Lempeng Samudera Pasifik. Dari interaksi ketiga lempeng tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai jalur gunung api atau *volcanic belt* atau *volcanic arc*, jalur gempa bumi atau *earthquake zone*, dan jalur pegunungan atau *mountain ridge*. Jalur tersebut selain memiliki potensi kekayaan alam juga memiliki potensi bahaya yang mengancam kehidupan manusia yang bermukim di wilayah sekitarnya dan dikenal juga dengan jalur bencana alam geologi (gerakan tanah/tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami). Jalur tersebut terbentang dari ujung barat laut pulau Sumatera (Aceh) melalui Bukit Barisan hingga ke wilayah Lampung. Jutaan penduduk mendiami atau bermukim di daerah rawan

bencana geologi tersebut. Pada masa lalu hingga saat ini daerah rawan bencana alam geologi tersebut telah banyak menelan korban jiwa maupun harta benda.

Demikian juga dengan Kota Padang yang terletak di pesisir pantai bagian Barat Pulau Sumatera dan berada di depan jalur penunjaman (*subduction zone*) Lempeng Hindia Australia ke bawah Kerak Benua Eurasia sangat rawan akan ancaman bahaya bencana alam geologi terutama ancaman gempa bumi tektonik dan tsunami serta tanah longsor seperti yang pernah terjadi pada masa lalu.



Gambar 3.1. Peta Padang

Sumber : BPBD Kota Padang

Secara geografis kondisi Kota Padang berada pada wilayah yang rawan akan bahaya bencana abrasi pantai dan bencana banjir. Dari sudut topografi wilayah, Kota Padang berada pada pesisir pantai yang merupakan muara dari 19 sungai dengan total panjang 124 km. Kondisi tersebut adalah merupakan salah satu penyebab Kota Padang menjadi rawan terhadap bahaya bencana banjir. Sebagian wilayah Kota Padang merupakan daerah berkontur rapat dengan jenis tanah yang cukup rapuh ditunjang dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata per tahun sebesar 23,22cm/tahun yang menyebabkan kota padang rawan terhadap longsor. Tata wilayah Kota Padang yang belum sempurna menyebabkan terjadinya konsentrasi pemukiman masyarakat di wilayah pesisir pantai yang merupakan pemukiman kelas menengah kebawah sehingga daerah tersebut berpotensi tinggi dalam penyebaran api pada saat terjadi kebakaran.

Kota Padang disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah Timur berbata dengan Kabupaten Solok dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia (BPS Kota Padang, 2008).

3.2. Demografi

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2008, tercatat jumlah penduduk kota Padang sebanyak 856.815 jiwa yang terdiri dari 423.039 jiwa laki-laki dan 433.776 jiwa perempuan dengan rasio 97,52 dimana laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,31% per tahun. Kecamatan yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya adalah Kecamatan Koto Tengah (4,27%). Sementara itu daerah yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Padang Tengah yaitu 10.696 per Km persegi dan daerah terendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Bungus Teluk Kabung yaitu 239 per Km persegi.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Bungus Teluk Kabung	12083	12033	24116
2	Lubuk Kilangan	21429	22102	43531
3	Lubuk Beggalung	54347	52294	106641
4	Padang Selatan	31217	32128	63345
5	Padang Timur	42545	44629	87174
6	Padang Barat	31175	30262	61437
7	Padang Utara	32746	43580	76326
8	Nanggalo	28750	30051	58801
9	Kuranji	58847	61462	120309
10	Pauh	27308	26361	53669
11	Koto Tengah	82592	78874	161466
Jumlah		423039	433776	856815

Sumber : BPS Kota Padang 2008

Komposisi Kota Padang menurut kelompok umur, menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) sebesar 28%, yang berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 68% dan yang berusia tua (>64 tahun) sebesar 4% (BPS, 2008). Dengan demikian penduduk kota Padang sebagian besar berada pada usia produktif dan yang paling sedikit adalah yang berusia tua.

3.3. Gempa 30 September 2009

Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat terjadi pada tanggal 30 September 2009 pukul 17.18 WIB berkekuatan 7,9 Skala Richter, lokasi di 0,84 LS – 99,65 BT berpusat (episentrum) di Samudera Hindia 57 km Barat Daya Pariaman dengan kedalaman 71 km.

Tabel 3.4. Rekapitulasi Korban Gempa Bumi 30 September 2009

No	Kecamatan	Korban Jiwa			
		Hilang	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
1	Lubuk Kilangan		5	31	32
2	Koto Tangah		19	23	61
3	Kuranji		36	29	38
4	Padang Barat		81	110	264
5	Padang Utara	1	28	52	31
6	Padang Selatan		35	42	43
7	Padang Timur		41	109	113
8	Nanggalo		27	10	59
9	Lubuk Begalung	1	40	24	60
10	Pauh		13	1	32
11	Bungus Teluk Kabung		8		38
12	Alamat Tidak Diketahui		11		
13	Luar Daerah		39		
	Jumlah	2	383	431	771

Sumber : BPBD Kota Padang, 2010

Gempa tersebut telah banyak menimbulkan korban jiwa. Korban jiwa akibat gempa bumi di kota Padang terdiri dari : hilang 2 orang, meninggal 383 orang (termasuk 11 orang yang alamatnya tidak diketahui dan 39 orang berasal dari luar Kota Padang), luka berat 431 orang dan luka ringan 771 orang. Korban jiwa meninggal terbanyak di Kecamatan Padang Barat (81 orang) dan yang paling sedikit di Kecamatan Lubuk Kilangan (5 orang).

Akibat gempa beberapa gedung ambruk dan rusak berat, jalan terbelah pada beberapa titik di Kota Padang, terjadi kebakaran di beberapa lokasi yang salah satu diantaranya di Pasar Raya Kota Padang. Gempa susulan terjadi pada pukul 17.38 WIB berkekuatan 6,2 Skala Richter (SR), lokasi di 0,72 LS – 99,94 BT berpusat di Samudera Hindia 22 km Barat Daya Pariaman dengan kedalaman 110 km. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 pukul 09.00 WIB kembali terjadi gempa bumi berkekuatan 7,0 SR.

Tabel 3.5. Rekapitulasi Kerusakan Rumah Penduduk

No	Kecamatan	Kerusakan Rumah Penduduk (Dalam Unit)		
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
1	Lubuk Kilangan	2441	2098	2315
2	Koto Tangah	7191	8423	7566
3	Kuranji	4990	4749	4753
4	Padang Barat	2160	2202	2399
5	Padang Utara	2666	3036	3102
6	Padang Selatan	2436	2535	2887
7	Padang Timur	1670	3087	3395
8	Nanggalo	2787	1911	1468
9	Lubuk Bungalung	4976	5305	6506
10	Pauh	1129	1426	2005
11	Bungus Teluk Kabung	1151	1044	1219
	Total	33597	35816	37615

Sumber : BPBD Kota Padang, 2010

Selain mengakibatkan korban jiwa gempa pada tanggal 30 September 2009 tersebut juga merusak 107.208 rumah penduduk pada sebelas kecamatan.

3.4. Organisasi

Untuk mengatasi bencana gempa pada tahun 2009, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maka kemudian dibentuk BPBD Kota Padang melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008. Pelantikan Kepala Pelaksana Badan, para Kepala Bidang, serta Sekretaris dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2009, sedangkan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dilantik pada tanggal 28 Februari 2009.

BPBD Kota Padang sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2008 memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, BPBD memiliki fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan menanganani pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Tabel 3.6. SOTK BPBD Kota Padang

No	Jabatan	Nama
1	Kepala / Sekretaris Daerah	Pemerintah Kota Padang
2	Unsur Pengarah	
	- Instansi	Pemerintah
	- Profesional / Ahli	
3	Unsur Pelaksana	
	- Kepala Pelaksana BPBD	Drs. Dedi Henidal
4	Sekretaris	Drs. Zamzami Dahlan
5	Ka. Sub. Bag. Umum	Drs. Jafrinal
6	Ka. Sub. Bag. Keuangan	Susy Ramadhani, SE
7	Ka. Sub. Bag. Penyuluhan Program	Rinaldi Kasim, SH
8	Ka. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	M. Juzar, BA
9	Kasi Kesiapsiagaan	Ir. Ruswendi
10	Kasi Pencegahan	Drs. Mukhlis Nasir
11	Kasi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana	Dadang Suhendar, S. Sos
12	Kasi Indetifikasi, Pendataan dan Pemulihan	Jet Peri, S. Sos
13	Ka. Bid. Kedaruratan dan Logistik	H. Asfirman, SH
14	Ka. Bid. Rehabilitasi & Rekontruksi	Drs. Mirar Masri
15	Kasi Rehabilitasi	Henky Mayaguezz, SPI.MT MSc
16	Kasi Rekontruksi	Roswizal, SH

Sumber : BPBD, 2011



Gambar 3.2. Kantor BPBD Padang

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Untuk mempercepat upaya pemulihan Kota Padang, proses rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang pasca gempa bumi, Pemerintah Kota Padang merasa perlu untuk membentuk suatu wadah yang bertugas untuk mendukung tugas-tugas BPBD dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dibentuklah Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 melalui Keputusan Walikota Padang Nomor 969 Tahun 2009, dan terakhir disempurnakan menjadi Badan Pendukung Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BPRR) Kota Padang Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 melalui Keputusan Walikota Padang Nomor 05 Tahun 2010. Berikut merupakan struktur BPRR:

a. Penanggung jawab

Bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan Tugas Badan dalam rangka mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang pasca bencana gempa tanggal 30 September 2009.

b. Pengarah

Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Ahli dan Tim Tekhnis dalam

mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang pasca bencana gempa tanggal 30 September 2009.

c. Koordinator

Mengkoordinir Tim Ahli dan Tim Teknis dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang pasca Gempa 30 September 2009.

d. Tim Ahli

1. Memberikan saran dan masukan dalam bentuk konsep-konsep yang konkrit kepada Badan mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang pasca gempa 30 September 2009.
2. Menyusun berbagai kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa tanggal 30 September 2009.
3. Membantu dan memfasilitasi kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah atau non pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri.

e. Tenaga Pendukung Tim Ahli

Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Tim Ahli dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang pasca Gempa 30 September 2009.

f. Tim Teknis

Tim Teknis yang terdiri dari beberapa pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Menghimpun dan mengidentifikasi data untuk menyusun rencana kegiatan penataan ruang dan infrastruktur pasca tanggap darurat gempa bumi tanggal 30 September 2009.
2. Melakukan kajian dan analisis tentang kebutuhan ruang bagi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur seperti perkantoran pemerintah dan fasilitas publik;
3. Menyusun rencana kegiatan penataan ulang kawasan/ruang pasca gempa;
4. Melakukan kajian dan analisis tentang kebutuhan sarana dan prasarana

infrastruktur seperti perkantoran pemerintah dan fasilitas publik.

5. Menghimpun dan mengidentifikasi data untuk menyusun rencana kegiatan pemulihan ekonomi pasca Kota Padang pasca gempa bumi tanggal 30 September 2009;
6. Menyusun rencana kegiatan kajian dan analisis tentang rencana pemulihan ekonomi masyarakat;
7. Menghimpun dan mengidentifikasi data untuk menyusun rencana kegiatan pemulihan sosial budaya masyarakat pasca gempa bumi tanggal 30 September 2009.
8. Menyusun rencana kegiatan kajian dan analisis tentang rencana pemulihan sosial budaya masyarakat.

Badan Pendukung Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BPRR) Kota Padang Padang Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 ini bertujuan mendukung tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam menanggulangi akibat bencana gempa bumi tersebut dimana seluruh output yang dihasilkan oleh BPRR disampaikan kepada BPBD, BAPPEDA dan instansi terkait lainnya sebagai bahan dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa Bumi Tahun 2009. Koordinator BPRR adalah Sekretaris Daerah Kota Padang, didukung oleh Tenaga Ahli yang merupakan *expert* yang berasal dari Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta serta Universitas Negeri Padang. Selain itu, anggota BPRR juga berasal dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang terkait langsung dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kota Padang.

Tugas dari BPRR adalah antara lain mempersiapkan *action plan* yang akan menjadi pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk kajian, proposal/rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang serta melakukan pendampingan secara intensif dalam setiap proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan dengan baik sesuai tujuan, sasaran dan waktu yang telah ditetapkan

3.5. Upaya Penanggulangan Bencana

3.5.1. Pemulihan

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam pada prinsipnya adalah upaya mengembalikan kondisi dan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana di wilayah yang terkena dampak bencana. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian (*Damages and Losses Analysis*) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bappenas dan Bank Dunia untuk memperoleh gambaran kebutuhan pemulihan pasca bencana (*Post Disaster Needs Assessment*). Keterkaitan antara *Damages and Losses Assessment* dengan *Human Recovery Needs Assessment* memberikan umpan balik bagi kebutuhan pemulihan dengan menempatkan masyarakat korban bencana dan lingkungan budidaya dan non-budidaya sebagai sasaran pemulihan pasca bencana. Ruang lingkup kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi:

1. Pemberian bantuan/stimulasi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk komponen pangan/nutrisi, air bersih dan sanitasi, hunian dan mata pencaharian
2. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya
3. Penghancuran sisa bangunan yang tidak layak fungsi dan tidak layak huni dan pembersihan puing untuk dibangun kembali sesuai zoning code dan building code
4. Pembangunan ulang atau perbaikan fisik berbagai infrastruktur publik dengan memenuhi kaidah keselamatan bangunan publik untuk memulihkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
5. Dukungan peraturan/kebijakan bagi percepatan pemulihan dan upaya lainnya yang dapat mendorong pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah.
6. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui berbagai kegiatan

peningkatan pemahaman dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan melalui kearifan lokal.

7. Dengan pendekatan keselamatan, maka sesuai dengan Undang Undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 32, Pemerintah dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan/atau mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan perorangan atas suatu benda sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Penentuan jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya skala kerusakan dan kerugian, besarnya kebutuhan pendanaan pemulihan yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi serta ketersediaan sumberdaya dan kapasitas pemerintah dan masyarakat. Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari dana pemerintah (APBN dan APBD Provinsi/Kota), dana masyarakat dan swasta serta bantuan lembaga internasional. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan aspek manajemen akuntabilitas dan transparan. Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kota Padang ini mencakup kurun waktu 18 (delapan belas) bulan, dengan mulai berlakunya sejak tahun anggaran 2009 hingga tahun 2011 dengan mengikuti tahun anggaran yang berlaku. Dengan memperhatikan sektor-sektor yang terkena dampak, kegiatan pemulihan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor yang mengalami dampak paling parah yang berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial daerah dan masyarakat. Sebagai gambaran, berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian serta pengkajian kebutuhan pemulihan, sektor paling parah terkena dampak adalah perumahan dan prasarana lingkungan permukiman, kemudian diikuti dengan sektor ekonomi produktif, sektor sosial, sektor infrastruktur dan lintas sektor lainnya. Sehingga, pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat akan lebih difokuskan pada pemulihan sektor perumahan dan permukiman, diikuti dengan pemulihan dan revitalisasi ekonomi masyarakat dan daerah, pemulihan sarana dan

parasana sosial (pendidikan dan kesehatan), pemulihan sarana dan prasarana pemerintahan yang diharapkan dapat segera diselesaikan pada tahun anggaran 2010, dengan tujuan:

1. Masyarakat korban bencana gempa dapat segera kembali ke rumah masing-masing
2. Pelayanan umum dapat segera terselenggara untuk mendukung pemulihan kehidupan dan kegiatan masyarakat seperti sediakala
3. Untuk mendukung upaya revitalisasi perekonomian daerah

Selaras dengan upaya pengurangan risiko pada konteks pasca bencana alam, termasuk didalamnya pembelajaran dari peristiwa gempa bumi tanggal 30 September 2009 dan 1 Oktober 2009 di wilayah Provinsi Sumatera Barat, serta perubahan paradigma penanggulangan bencana berdasarkan Undang Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; maka dengan pertimbangan bahwa dampak kerusakan sangat dominan pada komponen perumahan, serta akan memberikan dampak bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat korban bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di kota Padang mengutamakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Menggunakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai sarana membangun komunitas, membuka lapangan kerja dan menstimulasi ekonomi masyarakat; dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan jangka menengah dan panjang dengan pendekatan kesiapsiagaan, mitigasi dan pengurangan risiko bencana;
2. Dilaksanakan dengan pendekatan pengendalian korupsi dan tata pemerintahan yang baik, melalui koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan serta mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana gempa bumi
3. Dilaksanakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga kegiatan pembangunan perlu memperhatikan dampak jangka panjang;
4. Dilaksanakan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan memenuhi kebutuhannya;
5. Dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat korban bencana dengan pendekatan kesetaraan gender, dan dengan

lebih memperhatikan kelompok rentan seperti: penyandang cacat, miskin, keluarga orang tua tunggal perempuan, usia lanjut dan anak yatim piatu;

6. Dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal dengan mengedepankan prinsip alokasi ruang yang efisien, mengurangi pencemaran, melaksanakan pola efisiensi yang tinggi dalam penggunaan kembali dan daur ulang sumber daya yang tersedia, dan memanfaatkan energi terbarukan sebagai alternatif sumber energi;
7. Khusus untuk kegiatan pemulihan komponen perumahan dan kehidupan masyarakat, keduanya dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi masyarakat sesuai dengan karakteristik budaya lokal; sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
8. Dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis perbaikan lingkungan permukiman di daerah rawan bencana termasuk gempa bumi, termasuk building code dan sebagainya, sesuai peraturan yang berlaku;
9. Dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan bagi semua pihak melalui penyediaan informasi yang akurat serta pelayanan teknis, perijinan dan termasuk penyediaan unit pengaduan masyarakat korban bencana di wilayah kota Padang
10. Dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran dana yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
11. Dilaksanakan terutama oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melalui koordinasi yang efektif dan kerjasama antar pihak lintas sektor, dengan mekanisme pemantauan dan pengendalian sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
12. Dengan pertimbangan skala dan dampak kerusakan yang ditimbulkan, kegiatan pemulihan dilaksanakan selama 2 tahun anggaran, yaitu dimulai dengan kegiatan persiapan pada triwulan IV tahun anggaran 2009, selama tahun anggaran 2010 dan berakhir pada tahun anggaran 2011.

BAB IV

TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISA

Bab ini akan memaparkan temuan lapangan dan pembahasan mengenai proses upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap gempa pada tahun 2009. Temuan lapangan digambarkan mengenai perencanaan, koordinasi, pengkajian kerusakan serta uang dan perlengkapan, seseuai dengan 4 kerangka dari Coppola (2007) yang sudah diuraikan di bab 2. Selain itu faktor pendukung dan penghambat pada saat melakukan upaya pemulihan juga akan menjadi bahasan dalam bab ini. Hasil temuan lapangan tersebut dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Berikut pemaparan dari hasil temuan lapangan dan diikuti dengan paparan pembahasan hasil temuan lapangan tersebut.

4.1. Upaya Pemulihan

Upaya pemulihan merupakan serangkaian kegiatan utk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yg terkena bencana dgn memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. BPBD Kota Padang, selaku pemerintah Kota Padang bidang penanggulangan bencana tentu saja mempunyai upaya pemulihan dalam rangka mengembalikan kota Padang yang hancur akibat di hantam oleh gempa. Dalam Menghadapi kondisi tersebut dan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari upaya pemulihan Kota Padang pasca gempa bumi, Pemerintah Kota Padang merasa perlu untuk membentuk suatu wadah yang bertugas untuk mendukung tugas-tugas BPBD dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuklah Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 dan terakhir disempurnakan menjadi Badan Pendukung Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BPRR) Kota Padang.

4.1.1. Perencanaan

Perencanaan untuk upaya pemulihan adalah adanya upaya perbaikan konstruksi atau aksi-aksi lainnya yang dapat bertahan lama yang dapat menopang

kehidupan masyarakat. Salah satu opsi yang dapat membantu manajer bencana seperti memberlakukan penanggulangan pada konstruksi baru. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, pihak Pemerintah Kota Padang menyebut perencanaan sebagai tahap awal dalam penyusunan ide atau pemikiran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Berikut kutipan informan dalam penjelasannya:

“Pada dasarnya perencanaan merupakan proses awal, tahap pemikiran atau ide-ide yang dirangkum yang kemudian disusun untuk dicari mana yang baik untuk memecahkan sebuah masalah.”
(HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober 2011 Pukul 10.35 WIB)

Proses pengambilan kebijakan perencanaan upaya pemulihan Kota Padang terlebih dahulu melalui pertemuan dengan pihak legislatif Kota Padang, dan untuk saat ini sudah disahkan oleh DPRD yaitu berupa delapan kebijakan perencanaan. Berikut kutipan informan mengenai hal tersebut :

“Disini kami BAPPEDA sebagai dinas perencanaan Kota Padang, mendiskusikan dengan DPRD untuk merumuskan langkah-langkah apa saja yang akan kami lakukan dalam rangka memulihkan kota Padang. Sudah disahkan, kemudian juga sudah ditanda tangani oleh Bapak Gubernur, Pak Walikota. Maka tinggal kami laksanakan apa yang sudah kami rencanakan itu.” (FY, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang, 12 Oktober 2011 Pukul 10.00 WIB)

Dalam kenyataan, Pemerintah Kota Padang memiliki delapan program perencanaan dalam rangka melakukan upaya pemulihan Kota Padang. Adapun delapan perencanaan itu berupa:

1. Pemindehan Pusat Pemerintahan Kota Padang

Pemindehan tersebut ditandai dengan pindahnya lokasi Kantor Balai Kota dari Jalan M. Yamin ke kawasan Aia Pacah. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya pemindehan pusat pemerintahan kota Padang. Yang pertama adalah Gedung Balai Kota rusak parah, dan beberapa runtuh sehingga tidak dapat digunakan kembali. Alasan yang kedua adalah kawasan Balai Kota lama terletak

pada kawasan *Red Zone* (rawan tsunami) dikarenakan lokasinya yang dekat dengan pantai. Dan alasan yang terakhir adalah untuk membuka kawasan Padang Baru dimana kantor Balai Kota yang baru sekarang berada. Tujuannya adalah untuk memecah keramaian atau kepadatan penduduk yang terjadi di Kota Padang.

Berikut kutipan wawancara dengan informan yang menceritakan tentang proses tersebut :

“Kami memindahkan pusat pemerintahan tersebut dengan maksud untuk membuka lahan baru di wilayah by Pass ini, kecamatan Aia Pecah. Tujuannya agar keramaian Kota Padang tidak hanya berpusat di satu titik saja, ibaratnya memecah kepadatan lah Mas. Selain itu, kawasan pemerintahan yang lama terletak di wilaya red zone Mas, alias rawan tsunami. Soalnya itu posisinya kan dekat dengan pantai, paling-paling jaraknya hanya sekitar 2 sampai 3 kilo lah. Jadi sungguh bahaya sekali.” (FY, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang, 12 Oktober 2011 Pukul 10.00 WIB)

Hal senada dikemukakan oleh informan yang berperan di dalam organisasi penanggulangan bencana :

“Jadi pemindahan pusat Pemerintahan ini dikarenakan oleh hancurnya gedung balaikota serta membuka daerah Padang baru sehingga keramaian yang selama ini ada, dapat di pecah. Lagi pula kantor balaikota yang lama itu letaknya di sebelah Pasar Raya, jadi lokasinya sudah terlalu ramai.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Okober 2011 Pukul 10.35 WIB)



Gambar 4.1. Kantor walikota Padang yang rusak Akibat Gempa

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Tidak hanya itu saja, dalam perencanaan ini juga dilakukan pembangunan *Detail Engineer Design* untuk kawasan pusat perkantoran Pemerintah Kota Padang, rehabilitasi dan pembangunan kantor Camat Koto Tengah dan pembangunan fisik kantor Walikota. Berdasarkan pengamatan peneliti, saat ini kawasan Aia Pecah sudah digunakan menjadi pusat Pemerintahan Kota Padang yang baru, namun belum semuanya selesai. Dengan perencanaan ini, nantinya segala macam hal yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintahan Kota Padang akan dikelola dari wilayah ini.

Pada prosesnya, pelaksanaan pemindahan pusat pemerintahan ini sudah sepenuhnya selesai, kantor dinas-dinas yang berada di Aia Pecah, pembangunan kantor Camat Koto Tengah pun sudah selesai. Hanya saja pembangunan kantor Walikota yang masih tersendat. Sampai dengan saat ini baru pembangunan tahap 1 yang sudah selesai dilakukan, untuk tahap 2 dan tahap 3 belum dilaksanakan. Berikut kutipan wawancara yang mendukung kalimat peneliti:

“Untuk seluruh rencana pemindahan pusat pemerintahan ini, alhamdulillah 80 % sudah selesai. Di Aia Pecah, sudah lengkap semuanya berdiri yang berkaitan dengan instansi Pemerintahan. Mulai dari kantor Walikota, kantor BAPPEDA, kantor Dinas Sosial, Dinas Kesehatan semua sudah ada. Kantor Camat Koto Tengah yang baru pun sudah berfungsi. 20% lagi yang belum selesai adalah pembangunan kantor Walikota tahap 2 dan tahap 3.”(H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober Pukul 8.15 WIB)

2. Pemulihan Ekonomi dan Revitalisasi Pasar Raya

Perekonomian Kota Padang pasca bencana gempa bumi merupakan sektor yang paling terpuak. Inflasi tinggi, harga barang melonjak, pertumbuhan ekonomi stagnan, angka pengangguran meningkat akibat hancurnya berbagai fasilitas publik, yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat. Upaya pemulihan ekonomi ini meliputi road map pemulihan Ekonomi, *Detail Engineer Design* Pasar Raya dan Pasar Inpres, pembangunan

pasar Inpres, rehabilitasi dan pembangunan fasilitas perikanan dan kelautan, rehabilitasi fasilitas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan serta bantuan untuk bidang Usaha Kecil Menengah.



Gambar 4.2. Kondisi Pasar Raya

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Berikut kutipan wawancara dengan informan yang menceritakan tentang proses tersebut :

“Proses ini mungkin dapat dikatakan bagaimana caranya Pemerintah menaikkan daya beli masyarakat kembali serta menstabilkan kondisi ekonomi. Beberapa hari pasca gempa, seluruh barang harganya mahal disini Mas. Bahkan indomi saja bisa sampai 15 ribu per porsi. Bensin 50 ribu per liter. Oleh karena itu kami selaku pemerintah berusaha mengembalikan kondisi perekonomian kota padang seperti sebelum terjadinya gempa”.
(FY, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang, 12 Oktober 2011 Pukul 10.00 WIB)

Oleh karena itu perlu segera dicarikan solusi terbaik agar *economic recovery* dapat berlangsung lebih cepat sehingga inflasi turun dan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi ideal kembali sesuai dengan kondisi yang ada. Kegiatan ini

nantinya akan melahirkan beberapa *guidance* terkait dengan kebijakan *economic recovery* yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang ke depan.

Dalam pelaksanaannya, proses pemulihan ekonomi ini secara umum sudah selesai dikerjakan, bantuan untuk usaha kecil menengah juga sudah disalurkan. Hanya tinggal pembangunan Pasar Raya tahap dua dan tahap tiga yang terkendala dengan pedagang-pedagang setempat yang tidak mau dipindahkan untuk sementara.

“Untuk pembangunan revitalisasi Pasar Raya sudah kami laksanakan yang tahap pertama, untuk tahap kedua dan tahap ketiga menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kondisi di lapangan.” (MM, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, 10 Oktober 2011 Pukul 9.20 WIB)

3. Re-organisasi Jaringan Transportasi

Kegiatan ini berkaitan erat dengan adanya indikasi perubahan pola *trip demand* (perpindahan rute perjalanan) masyarakat pasca musibah gempa bumi. Perubahan *trip demand* tersebut diantaranya disebabkan karena terjadinya perpindahan pemukiman sebagian penduduk dari kawasan pesisir pantai ke kawasan timur, serta diakibatkan oleh berpindahnya beberapa pusat aktifitas publik seperti kantor, sekolah dan lain-lain serta pemindahan pusat pemerintahan. Perencanaan ini meliputi Rencana induk transportasi Kota Padang, penyusunan *Bus Rapid Transit* (BRT) Kota Padang, rehabilitasi pengembangan fasilitas lalu lintas, penyediaan sarana pengujian kendaraan bermotor serta rehabilitasi dan pengembangan pelabuhan Teluk Bayur. Berikut keterangan dari informan mengenai proses tersebut :

“Kami selaku Pemerintah Kota Padang akan mengintegrasikan seluruh transportasi di Kota ini. Niscaya nantinya akan membentuk suatu kesatuan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Sementara yang poin b berarti dalam Kegiatan ini akan dibahas juga rencana relokasi Terminal Regional Bingkuang Type A di Aia Pacah yang akan dijadikan sebagai lokasi Pusat Pemerintahan Kota Padang yang baru, serta penetapan beberapa kebijakan strategis disektor transportasi Kota Padang

kedepan.”(FY, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang, 12 Oktober 2011 Pukul 10.00 WIB)

Pembahasan lain yakni berupa penataan sistem perparkiran di Kota Padang. Dimana nantinya akan ada sebuah sistem yang mengatur mengenai perparkiran kendaraan bermotor sehingga akan menjadi lebih rapi. Berdasarkan pengamatan peneliti, memang sistem parkir kendaraan di Kota Padang sudah cukup semrawut pada daerah-daerah tertentu. Banyak kendaraan yang parkir seenaknya. Dan tidak jarang hal tersebut justru menimbulkan kemacetan di jalan-jalan tertentu. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem yang baik dalam pengelolaannya sehingga masalah-masalah seperti kemacetan dan pencurian kendaraan bermotor dan diminimalisir.

Dalam kenyataan dilapangan, peneliti belum melihat adanya perbaikan sistem transportasi kota Padang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Masih banyak *traffic light* yang belum berfungsi, belum ada tempat untuk pengujian kendaraan bermotor, kendaraan bermotor masih banyak yang parkir dipinggir jalan. Hal itu dikarenakan, BAPPEDA kota Padang masih menunggu persetujuan dari BAPPENAS untuk pembangunan kembali sistem transportasi khususnya untuk penyediaan BRT dan penataan sistem perparkiran Kota Padang.

4. Penataan Pusat Kota Lama

Di daerah ini terletak bangunan-bangunan kuno bersejarah peninggalan zaman penjajahan Belanda yang merupakan cagar budaya. Ketika gempa, banyak bangunan-bangunan tersebut yang rusak, bahkan hancur. Melalui perencanaan kebijakan ini, diharapkan dapat membangun kembali bangunan-bangunan bersejarah tersebut dengan tidak meninggalkan bentuk aslinya sehingga masih dapat dipertahankan sebagai bangunan cagar budaya.



Gambar 4.3. Kawasan Pusat Kota Lama yang Rusak Akibat Gempa

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Perencanaan ini juga mencakup penataan kawasan eks CBD dimana kawasan eks CBD merupakan kawasan yang terletak di wilayah Padang Barat yang lokasinya dekat dengan Balai Kota lama dan Pasar Raya. Penataan tersebut dilakukan sebagai dampak dari pindahanya Pusat Pemerintahan Kota Padang ke Aia Pecah sehingga akan menyebabkan pergeseran-pergeseran fungsi primer yang sebelumnya ada di kawasan ini akan pindahke Aia Pecah, sehingga perlu ditata kembali agar mempunyai fungsi yang lain. Berikut keterangan pernyataan informan mengenai hal ini:

“Kita membangun kembali kawasan Kota lama di daerah Pondok yang hancur maupun rusak akibat gempa. Tujuannya adalah sebagai pemeliharaan cagar budaya seperti bangunan-bangunan Belanda yang ada disana, bangunan budaya-budaya etnis Cina. Kawasan tersebut merupakan salah satu daya tarik Kota Padang. Apabila kita tidak memperbaikinya, lantas apalagi daya tarik Kota Padang?” (MM, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, 10 Oktober 2011 Pukul 9.20 WIB)

Berdasarkan pengamatan peneliti, perencanaan ini memang beberapa sudah selesai dilaksanakan dan masih ada beberapa bangunan tua yang sedang dibangun kembali. Untuk kawasan Padang Lama, beberapa cagar budaya seperti bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda sudah selesai dikerjakan, ada juga beberapa

bangunan etnis Cina yang ketika peneliti datang kesana, masih dalam tahap penyelesaian. Sementara untuk kawasan eks CBD, sudah cukup tertata dengan baik. Bangunan-bangunan rusak sudah banyak yang diperbaiki, namun masih ada juga yang berupa tanah kosong akibat bangunannya runtuh dan belum dibangun kembali.

5. Pemulihan Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Fasilitas Pendidikan merupakan merupakan salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan paling parah akibat gempa. Tidak hanya gedung-gedung sekolah, tetapi juga sarana lainnya. Akibatnya, banyak siswa yang tidak bisa belajar di sekolahnya masing-masing, mereka menggunakan tenda-tenda darurat untuk mengikuti proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pemulihan yang tepat dalam memperbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan di Kota Padang.



Gambar 4.4. SMAN 1 Padang yang telah dibangun Pasca-gempa

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Hal yang serupa terjadi dengan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Padang, banyak rumah sakit, puskesmas, yang hancur dan rusak berat akibat gempa. Maka dari itu, fasilitas dan sarana prasarana kesehatan perlu menjadi perhatian utama untuk segera dipulihkan untuk menjamin tersedianya fasilitas kesehatan bagi masyarakat Kota Padang

Untuk pemulihan sarana pendidikan dan kesehatan, memang Pemerintah Kota Padang menjadikan langkah ini sebagai prioritas. Peneliti banyak melihat bangunan-bangunan sekolah yang sudah selesai dibangun dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu juga dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Bahkan ada beberapa sekolah dan rumah sakit yang di atasnya dilengkapi dengan helipad. Bisa dikatakan bahwa rencana pemulihan ini sudah selesai dan sesuai dengan rencana awalnya. Berikut penjelasan informan:

“Bagian ini meliputi perbaikan sekolah-sekolah dan rumah sakit yang rusak akibat gempa. Sudah banyak yang selesai dibangun sekolah-sekolah yang hancur akibat gempa. Dan setelah dibangun ternyata jauh lebih baik. Ada SMA 1, SMK 9, SMK 5, SMP 25, SMP 24, SMP 23. Itu semua sudah sudah dibangun kembali dan sudah berfungsi, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah sekolah-sekolah yang saya sebutkan itu semua sebageian besar memiliki helipad di atasnya untuk mempermudah evakuasi apabila nanti ada bencana serupa yang terjadi.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober 2011 Pukul 10.35 WIB)

6. Pemulihan Rumah Masyarakat dan Pemukiman

Pada kenyataan, proses pemulihan rumah masyarakat merupakan bukti kepedulian Pemerintah Kota Padang kepada masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan sebagai dampak dari gempa. Upaya yang dilakukan berupa bantuan uang tunai kepada setiap penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan. Bantuan yang diberikan juga bervariasi tergantung dari seberapa besar kerusakan yang dialami. Untuk rumah yang mengalami rusak ringan, bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar satu juta rupiah untuk setiap rumah. Sementara bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang rumahnya mengalami rusak sedang akan diberikan bantuan sebesar sepuluh juta rupiah untuk masing-masing rumah. Dan yang terakhir, bantuan sebesar lima belas juta rupiah akan diberikan kepada masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat ataupun hancur total.

“Pemulihan rumah masyarakat ini kami lakukan dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya terkena gempa. Mungkin anda sudah banyak tahu mengenai hal ini kalau penduduk yang rumahnya rusak berat akan diberi bantuan 15 juta, 10 juta untuk rusak sedang dan 1 juta untuk rusak ringan.” (MM, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, 10 Oktober 2011 Pukul 9.20 WIB)

Sangat disayangkan sekali Pemerintah Kota Padang belum bergerak cukup cepat untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang rumahnya hancur akibat gempa. Baik itu rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Hal itu peneliti peroleh dari perbincangan peneliti dengan beberapa warga Kota Padang yang rumahnya hancur akibat gempa 2 tahun yang lalu. Mereka mengakui bahwa mereka belum menerima sepeser pun bantuan uang dari Pemerintah Kota Padang. Berkali-kali rumah mereka didatangi oleh petugas lapangan untuk didata kerusakannya, tapi bantuan tidak kunjung mereka terima. Pemerintah Kota Padang pun mengakui bahwa sampai saat ini belum seluruh warga mendapatkan bantuan yang dijanjikan. Tapi mereka akan tetap berupaya agar hal itu dapat terpenuhi. Berikut pengakuan seorang staf pelaksanaan perencanaan ini:

“Memang untuk saat ini belum semua masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa hal itu dikarenakan baru 2 dari 3 tahap bantuan yang selesai kami bagikan. Namun untuk masalah ini, kami berjanji bahwa seluruh masyarakat Kota Padang yang sudah didata yang rumahnya rusak akibat gempa akan kami berikan bantuan tergantung bagaimana kondisi kerusakannya” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober Pukul 8.15 WIB)

7. Pemulihan Dini Mental Masyarakat.

Sebagai akibat dari bencana, tentu saja banyak masyarakat yang mengalami trauma, stres, bahkan ada yang sampai kondisi kejiwaannya terganggu. Untuk itu dilakukan pemulihan mental masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi stres dan trauma pada masyarakat. Proses ini sendiri dinamakan *Traumatic Healing*

yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat khususnya individu-individu yang mengalami stres ataupun trauma akibat gempa.

Disamping itu, Pemerintah Kota Padang juga memberikan pelatihan simulasi penanggulangan bencana kepada masyarakat yang di koordinir oleh BPDB Kota Padang dengan tujuan agar masyarakat lebih siap apabila bencana serupa kembali terjadi di Kota Padang.

Pada prosesnya upaya pemulihan mental masyarakat dilakukan dengan baik. BPDB Kota Padang, selaku pelaksana program ini membuat sebuah buku pedoman pemulihan mental pasca bencana bersama-sama dengan pakar pemulihan mental dari Universitas Negeri Padang (UNP) yang nantinya buku tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat yang kemudian diimplementasikan dengan sistem *Training On Trainee* (TOT). Seiring dengan upaya pemulihan mental, BPDB juga melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana cara menghadapi apabila terjadinya sebuah bencana. Jumlah peserta pelatihan tersebut tidaklah banyak, hanya berjumlah 30 orang tiap Kecamatan. Mereka yang dilatih nantinya diharapkan akan menjadi ujung tombak penanggulangan bencana disetiap wilayahnya masing-masing. Berikut penjelasan informan mengenai proses tersebut:

“Dalam prosesnya upaya pemulihan mental ini kami bersama dengan ahli dari UNP membuat sebuah buku mengenai pedoman pemulihan mental masyarakat pasca gempa. Buku itu berisi mengenai kajian-kajian dan penelitian-penelitian mereka kemudian kami dokumentasikan dalam sebuah buku. Kemudian kita sosialisasikan atau kamu berikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat Kota Padang dengan sistem TOT (*Training on Trainee*). Jadi pelatihan kepada masyarakat yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam setiap penanggulangan bencana. Jumlahnya tidak banyak, hanya 30 orang per Kecamatan karena memang anggaran kami terbatas.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober 2011 Pukul 10.35 WIB)

8. Revisi RTRW dan RPJM

Berdasarkan laporan yang peneliti peroleh, RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kota Padang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Padang untuk memperbaiki tatanan Kota Padang. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Padang hanya menyediakan dana pendamping untuk pembahasan dan konsultasi ke Provinsi Sumatera Bara yang nantinya akan disahkan oleh DPRD Kota Padang dan menjadi Peraturan Daerah. RTRW yang dibuat itu juga akan memperhatikan aspek kebencanaan dimana nantinya setiap penataan wilayah di Kota Padang akan dibuat dengan konstruksi yang tahan gempa. Yang tujuannya untuk mencegah terjadinya kerusakan bangunan yang lebih parah.

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kota Padang sebenarnya sudah selesai disusun pada tahun 2009 yang lalu. Namun agar lebih memperhatikan aspek pencegahan kebencanaan, khususnya mitigasi maka dirasa perlu untuk dikaji kembali dan ditinjau ulang. Adapun pernyataan informan yang menjelaskan proses tersebut:

“RTRW merupakan singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Artinya disini kami menata ulang wilayah kota Padang agar lebih tertib dan teratur. Kota ini luluh lantak ketika di hantam gempa, maka dari itu kami merevisi kembali dokumen-dokumen RTRW agar ya tadi itu, penataan kota Padang lebih teratur. RPJM itu singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Jadi maksudnya bagaimana kami merencanakan pembangunan Kota ini. Aspek yang diperhatikan dalam pembangunan lebih ditekankan kepada aspek kebencanaan contohnya seperti bangunan yang tahan gempa. Ya tujuannya untuk pencegahan, agar apabila bencana gempa kembali terjadi kami sudah lebih siap dan bisa meminimalisir kerusakan.” (FY, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang, 12 Oktober 2011 Pukul 10.00 WIB)

4.1.2. Koordinasi

Pada dasarnya koordinasi merupakan kegiatan dimana adanya sebuah hubungan yang kompleks saling berkaitan satu sama lain yang terjaga dengan

baik. Kesuksesan dari koordinasi upaya pemulihan pasca-bencana tergantung kepada kemampuan perencana untuk mencapai gambaran secara luas dalam struktur koordinasi. Berikut penjelasan informan mengenai koordinasi:

“Koordinasi itu kan komunikasi yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober 2011 Pukul 10.35 WIB)

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, koordinasi yang dilakukan dalam rangka memulihkan Kota Padang pasca gempa terbilang cukup. Walaupun ada kesalah-pahaman atau tumpang tindih perintah, tetapi secara umum semuanya berjalan dengan lancar. Dalam berkoordinasi, pemerintah Kota Padang melakukan kontak dengan pihak-pihak yang terkait untuk menghindari terjadinya masalah dalam melakukan upaya pemulihan. Berikut kutipan wawancara dengan informan yang terkait mengenai proses koordinasi:

“Ketika melakukan koordinasi, kami saling menghubungi satu sama lain, saling support, saling bantu. Apakah ada kendala atau tidak, apakah semua sudah sesuai rencana atau tidak. Kalau tidak, kita lihat apa yang salah. Berarti perlu dicari alternatif lain. Intinya kerja sama semua pihak untuk membangun kembali Kota Padang.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober 2011 Pukul 10.35 WIB)

Adapun rincian pihak yang terlibat selama koordinasi sesuai dengan perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemindahan Pusat Pemerintahan

Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan ini adalah BAPPEDA bidang Pengembangan wilayah yang berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan.

2. Pemulihan Ekonomi dan Revitalisasi Pasar Raya

Kegiatan ini dikelola oleh BPBD, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang bersama-sama dengan Dinas Pasar

3. Re-organisasi Jaringan Transportasi

Yang mengelola kegiatan ini adalah BAPPEDA bidang Sarana Prasarana dan Utilitas bersama dengan Dinas Perhubungan

4. Penataan Kawasan Padang lama dan Eks CBD

Untuk penataan kawasan Padang lama dan eks CBD dikoordinir oleh Dinas Tata Ruang dan Tata bangunan yang bekerja sama dengan BAPPEDA bidang Perekonomian serta dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5. Perbaikan Sarana Kesehatan dan Pendidikan

Beberapa instansi yang berkecimpung dalam kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPBD, dan BAPPEDA bidang Sosial Budaya

6. Pemulihan Rumah Masyarakat

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah BAPPEDA, BPBD bersama-sama dengan Dinas PU

7. Pemulihan Mental Masyarakat

BPBD bersama-sama dengan para pakar mental dari UNP serta BKBPP (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) bertugas menangani masalah ini

8. Revisi RTRW dan RPJM

Kegiatan ini dikelola oleh BAPPEDA, BPBD serta Dinas Tata Ruang

4.1.3. Pengkajian Kerusakan

Pengkajian kerusakan dapat membantu perencana untuk mengidentifikasi jumlah dan tipe bangunan yang hancur ataupun rusak. Selama proses perencanaan upaya pemulihan, pengkajian ini akan bertindak sebagai panduan utama untuk menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian dan dalam prioritas yang seperti apa serta bagaimana mendistribusikan sumberdaya yang ada secara efektif. Disamping itu dalam upaya pengkajian ini, segala jenis sumberdaya perlu dialokasikan kembali dan dicari masalah-masalah yang ada sebelum terlambat untuk memperbaikinya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sebagai bagian dari pemulihan pasca gempa, Pemerintah Kota Padang melakukan pengkajian kerusakan terhadap bangunan yang ada di Kota Padang. Selama melakukan pengkajian kerusakan, Pemerintah Kota Padang bidang penanggulangan bencana (BPBD) langsung turun ke tempat-tempat yang terkena gempa cukup parah. Mereka mengkaji langsung tiap-tiap bangunan baik itu yang masih berdiri ataupun sudah rubuh. Kalau masih berdiri diselediki lebih lanjut apakah bangunan tersebut masih layak untuk digunakan. Begitu juga untuk mengkaji kerusakan rumah penduduk yang nantinya untuk digolongkan mana yang termasuk kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Dalam pengkajian ini, indikator yang digunakan lebih terhadap kondisi fisik bangunan tersebut. Dengan kondisi fisik itulah Pemerintah Kota Padang akan menentukan termasuk ke golongan yang mana bangunan yang mengalami kerusakan tersebut.

Saat melakukan implementasi mengenai pengkajian kerusakan, Pemerintah Kota Padang melakukan apa yang disebut dengan DALA (*Damage And Loss Analysis*). Mereka menganalisa apa saja yang menjadi kerusakan akibat gempa, berapa kerugiannya, kemudian bagaimana penanganannya. Kemudian dari hal-hal tersebut akan diproses lebih lanjut untuk ditentukan apa yang akan dilakukan dengan bangunan yang sudah rusak tersebut. Selain itu, khusus untuk pemulihan rumah penduduk, BPBD Kota Padang bekerja sama dengan masyarakat untuk menunjuk seorang fasilitator. Fasilitator ini mempunyai fungsi sebagai penghubung antara masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa dengan pihak pemerintah Kota Padang. Selain itu juga fasilitator mempunyai tugas untuk mencatat dan mengkaji seberapa besar kerusakan yang dialami oleh tiap-tiap rumah secara detil yang kemudian akan diproses oleh Pemerintah kota. Berikut penjelasannya:

“DALA ini adalah *Damage And Loss Analysis*. Kami menganalisa kerusakan dan kerugian sebagai dampak dari gempa yang lalu. Dari sana kita masukan kedalam laporan untuk nantinya diproses atau divalidasi namanya, kemudian setelah itu baru kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan dengan bangunan yang rusak tersebut.”(FY, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang, 12 Oktober 2011 Pukul 10.00 WIB)

Dan ini adalah kutipan wawancara dengan informan mengenai pengkajian kerusakan rumah penduduk:

“Khusus untuk pengkajian kerusakan rumah penduduk, BPBD Kota Padang bekerja sama dengan masyarakat untuk menunjuk fasilitator di setiap daerah dimana fasilitator tersebut bertanggung jawab kepada penanggung jawab operasional kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Fasilitator inilah yang melakukan pengkajian kerusakan. Dia mencatat bagaimana kerusakan rumah penduduk bagaimana kerusakannya, apakah bangunannya miring sekian persen, temboknya hancur, atau mungkin lantainya retak-retak, terbelah atau miring. Nanti dari situ baru dikategorikan apakah rumah tersebut termasuk kategori rusak berat, sedang atau ringan. Nah, setelah itu, divalidasi kepada Pemerintah Kota untuk selanjutnya diberikan bantuan.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober 2011 Pukul 10.35 WIB)

4.1.4. Uang dan Perlengkapan

Tanpa dana yang mencukupi, akan sulit untuk memulihkan suatu wilayah yang terkena bencana meskipun banyak relawan lokal dan internasional memberikan bantuan peralatan serta perlengkapan. Investasi keuangan dalam rekonstruksi suatu komunitas sangat dibutuhkan untuk memenuhi target upaya pemulihan seperti memperbaiki dan membangun kembali bangunan yang hancur, memulai kembali perekonomian ataupun kegiatan lainnya.

Dalam upaya pemulihan, uang dan perlengkapan lain yang dibutuhkan diperoleh dari berbagai macam sumber seperti bantuan dari beberapa instansi perusahaann baik swasta maupun BUMN, bantuan luar negeri, APBN dan APBD. Tidak disebutkan berapa jumlah bantuan yang mereka terima, tetapi mereka menyebutkan berapa dana yang mereka butuhkan untuk proses pemulihan ini. Saat peneliti memperoleh informasi ini, Pemerintah Kota Padang baru memperoleh dana sekitar 1 triliun rupiah. Sedangkan dana total yang mereka butuhkan berkisar 2 triyun rupiah. Berikut alasan informan mengapa tidak mau menjelaskan rincian besarnya dana yang diperoleh:

“Kalau untuk berapa besarnya dana yang kami terima, mohon maaf Mas, saya engga bisa bantu. Itu sensitif soalnya. Lagipula wewenang untuk memberikan informasi keuangan bukan berada ditangan saya.” (FY, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang, 12 Oktober 2011 Pukul 10.00 WIB)

Mengenai alokasi keuangan bisa dilihat di bagian lampiran. Berikut rincian informasi sumber dana dan perlengkapan yang diterima oleh Pemerintah Kota Padang yang peneliti peroleh:

- a. APBN
- b. APBD
- c. BUMN (Bank Mandiri dan Pertamina, Semen Padang)
- d. Stasiun TV (RCTI, MetroTV, TVOne)
- e. Bantuan Luar Negeri (Bank Dunia, Jepang, Arab Saudi, Hongaria)
- f. Dinas Kesehatan

Berikut pernyataan informan mengenai uang dan perlengkapan diperoleh Pemerintah Kota Padang:

“Kita mendapatkan dana dari APBN dan APBD, tetapi yang utama itu dari APBD. Lembaga BUMN juga memberikan bantuan kok sama kita seperti Pertamina dan Bank Mandiri. Kalau dari pihak swasta ada beberapa stasiun TV seperti RCTI, MetroTV dan TV One.”(MM, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, 10 Oktober 2011 Pukul 9.20)

Informasi pendukung lainnya yang disampaikan oleh informan:

“Hhhmmmm, kalau kebutuhan-kebutuhan misalnya alat berat saat membangun kembali gedung-gedung atau fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kita dapat bantuan dari Semen Padang. Mungkin juga kebutuhan-kebutuhan obat-obatan kita dapat dari Dinas Kesehatan untuk mengobati korban.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober 2011 Pukul 10.35 WIB)

4.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Upaya pemulihan pasca gempa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada kalanya sesuatu terjadi diluar dugaan, dan hal tersebut bisa saja menghambat upaya pemulihan yang dilakukan, atau justru sebaliknya mempercepat upaya pemulihan. Berdasarkan data yang peneliti temukan, inilah faktor-faktor penghambat serta faktor pendukung yang dialami oleh Pemerintah Kota Padang dalam rangka menanggulangi bencana gempa 20 September 2011.

4.2.1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan segala sesuatu yang memperlancar kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, dalam hal ini adalah upaya pemulihan gempa Padang 2009. Secara garis besar ada tiga faktor pendukung yang memperlancar upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang.

1. Kesungguhan Pemerintah Kota Padang dalam menangani bencana

Faktor ini menjelaskan kepada peneliti betapa seriusnya Pemerintah Kota Padang dalam menangani bencana gempa yang lalu. Keseriusan itu disebabkan oleh adanya rasa saling memiliki, saling menghargai dan masih kuatnya rasa persaudaraan di daerah ini. Pasca-gempa, semua elemen masyarakat di Kota Padang baik itu Pemerintah ataupun tidak merasakan kesulitan yang sama mulai dari kesulitan air bersih, harga bahan pokok naik tajam, dll. Berikut keterangan informan:

“itikad baik dari seluruh elemen Pemerintah Kota Padang. Terlebih mereka semua tinggal di Padang. Mereka mengetahui bagaimana kerusakannya, berapa besar korban jiwa, kerugiannya semua, dampaknya semua mereka rasakan. Semangat untuk membangun kembali Kota Padang juga terasa walaupun mereka tidak mendapatkan banyak dalam upaya pemulihan ini. Tapi nilai moralnya itu yang patut di apresiasi.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober 2011 Pukul 10.35 WIB)

2. Tenaga Ahli Profesional

Dalam upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, tentu saja perlu tenaga ahli dalam setiap bidang. Tenaga ahli ini merupakan salah satu faktor yang nantinya akan menentukan seberapa cepat Kota Padang dapat pulih. Pada kenyataannya, tenaga ahli yang dipekerjakan untuk membangun kembali Kota Padang memanglah orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Salah satu informan mengatakan bahwa penempatan tenaga ahli untuk pemulihan Kota Padang sudahlah sangat baik, khususnya dibidang kesehatan serta penanganan mental masyarakat. Berikut penjelasan informan yang mengenai proses tersebut:

“Kita punya tenaga ahli yang profesional yang kita ambil dari pusat, dalam hal ini berarti BNPB. Begitu pula dengan tenaga ahli di bidang kesehatan, pendidikan kita punya ahlinya meskipun bukan berasal dari Sumatera Barat.” (MM, Kabid Rehabilitas dan Rekonstruksi, 10 Oktober 2011 Pukul 9.20)

Keterangan pendukung lainnya yang peneliti dapatkan:

“Penempatan tenaga ahli dan SDM juga sudah cukup bagus.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober 2011 Pukul 10.35 WIB)

3. Partisipasi Aktif Peserta Pelatihan

Salah satu upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang adalah memulihkan mental masyarakat dan memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang kebencanaan kepada beberapa pilar masyarakat. Masyarakat yang diberikan pelatihan secara umum memiliki tingkat keaktifan yang tinggi. Mereka banyak bertanya, menyimak dengan baik, hal itu tentu saja mempermudah pihak BPBD sebagai koordinator pelatihan penanggulangan bencana. Antusias peserta pelatihan tersebut bisa dikatakan sangat baik. Hal itu terlihat jumlah peserta yang selalau ramai apabila BPBD melakukan pelatihan. Selain itu, mereka yang dilatih mudah untuk diajak bekerja sama. Berikut pernyataan informan:

“Untuk faktor pendukung, saya sebagai orang lapangan berpendapat bahwa adanya kemudahan dalam memberikan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Mereka

aktif, antusiasme tinggi dan mudah diajak bekerja sama. Ini juga kan mempercepat kerja kami.” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober Pukul 8.15 WIB)

4.2.2. Faktor Penghambat

Upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang tidak serta merta mulus begitu saja, banyak jalan terjal yang harus dihadapi. Dalam kenyataannya, hambatan tersebut lah yang membuat mengapa sampai sekarang upaya pemulihan yang dilakukan belum tuntas sepenuhnya. Adapun hambatan-hambatan yang ada saat upaya pemulihan adalah:

1. Kekurangan Dana

Bukan sebuah hal yang mengejutkan apabila uang adalah faktor penting dalam sebuah upaya pemulihan. Dana yang ada saat ini tidak mampu menutupi kerugian yang terjadi akibat gempa. Faktanya, saat ini baru 50% saja dana yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Padang untuk melakukan upaya pemulihan. Berikut hasil wawancara peneliti yang menjelaskan hambatan tersebut:

“faktor penghambat sudah jelas ya masalah kita dana. Mas bisa liat sendiri kita butuh dana 2T tapi untuk saat ini kita baru bisa mendapatkan 1T. Masih ada dana 1T lagi yang belum kita dapatkan.” (FY, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang, 12 Oktober 2011 Pukul 10.00 WIB)

2. Kurangnya SDM Lokal

Dalam menangani upaya pemulihan pasca bencana, tentu saja diperlukan SDM yang berkualitas. Pemerintah Kota Padang mengalami kesulitan mencari SDM dalam rangka memulihkan kembali Kota Padang pasca gempa. Adapun penyebabnya adalah pada saat terjadinya gempa, BPDB Kota Padang baru 7 bulan resmi berdiri. Orang-orang yang terlibat didalamnya pun tidak mempunyai pengalaman yang memadai. Maka dari itu, Pemerintah Kota Padang mengambil tenaga ahli dari luar Padang seperti dari BNPB dan BAPPENAS serta dari instansi lainnya untuk membantu memulihkan kota Padang serta menyelesaikan masalah-

masalah yang ada akibat gempa. Berikut kutipan wawancara yang mendukung pernyataan peneliti:

“Hanya saja, dalam masa yang singkat semenjak berdirinya BPBD Kota Padang, pengalaman dari penanggulangan bencana dapat dikatakan sangat minim. Karena kita masih dalam banyak penataan kedalam pelatihan-pelatihan sementara tugas yang diemban sangat lah berat. (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober 2011 Pukul 10.35 WIB)

Pernyataan serupa juga dijelaskan oleh informan lainnya:

“Faktor penghambat lainnya yaitu kami kekurangan SDM, tenaga profesional. Kita harus mengambil SDM dari luar daerah yang kebanyakan dari pusat. Nah, itu memakan waktu lama untuk segera bertindak, mulai dari waktu perjalanan, belum lagi mereka sering-sering pulang sehingga menjadi molor pengerjaannya.” (FY, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang, 12 Oktober 2011 Pukul 10.00 WIB)

3. Pendataan korban jiwa dan kerusakan

Hambatan lain yang mengganggu kerja Pemerintah Padang adalah pendataan korban jiwa dan kerusakan. Padahal data yang diperoleh sangatlah penting untuk mengetahui seberapa besar kerugian yang dialami akibat gempa. Pada prosesnya, Pemerintah Kota Padang harus bekerja keras untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat. Hambatan ini disebabkan oleh kurangnya SDM dari Pemerintah untuk sehingga memakan waktu lebih lama dalam mendata seluruh kerugian. Berikut hasil wawancara dengan informan yang menjelaskan masalah tersebut:

“kita sulit untuk melakukan pendataan. Mungkin ini berkaitan dengan kurangnya SDM tadi ya, jadi waktu yang dibutuhkan sangatlah lama. Padahal pendataan ini penting sekali untuk mengetahui berapa besar kerugian maupun korban jiwa serta

untuk memberikan bantuan” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober Pukul 8.15 WIB)

4. Pedagang Pasar yang kurang kooperatif

Hambatan ini dirasakan Pemerintah Kota Padang dalam rangka melakukan revitalisasi Pasar Raya. Ketika itu, Pemerintah Padang berusaha untuk sesegera mungkin untuk membangun bangunan Pasar Raya yang baru. Namun untuk melaksanakannya perlu dilakukan seterilisasi daerah tersebut, dengan cara memindahkan pedagang-pedagang yang ada untuk sementara dan nantinya ketika Pasar Raya tersebut sudah selesai dibangun, para pedagang tersebut akan ditempatkan kembali di Pasar Raya. Tetapi dalam proses pelaksanaannya, pedagang-pedagang tersebut enggan untuk dipindahkan ke daerah yang sudah disediakan oleh Pemerintah. Para pedagang tersebut berasal karena daerah baru yang disarankan oleh Pemerintah tidak ramai alias sepi, yang bisa membuat barang dagangan mereka nantinya tidak laku. Berdasarkan keterangan informan, sempat terjadinya konfrontasi fisik untuk sesaat antara aparat Pemerintah dengan pedagang pasar, namun pada akhirnya kejadian tersebut dapat dihindari tanpa menimbulkan korban jiwa. Berikut ulasannya:

“Lalu untuk masalah berikutnya itu dari hhhmm... Penerimaan masyarakat. Khusus di bidang revitalisasi pasar raya seperti untuk yang tadi saya bilang, adanya penolakan dari para pedagang untuk dipindahkan sementara. Itu kan menghambat kerja kami. Karena pedagang-pedagang disana ngotot untuk tetap bertahan disana, padahal kalau dilihat-dilihat sebenarnya bahaya sekali, masih ada bangunan pasar lama yang kondisinya hampir rubuh. Tapi mau bagaimana lagi? Kita sudah berusaha melarangnya tapi tidak bisa, nanti kalau kita usir paksa akan terjadi bentrok.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober 2011 Pukul 10.35 WIB)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan digambarkan pelaksanaan dari proses pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam usaha memulihkan kondisi Kota Padang yang luluh lantak pasca gempa 30 September 2009 beserta dengan faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Pada sub bab saran, akan dijelaskan mengenai rekomendasi peneliti bagi pihak Pemerintah Kota Padang bidang penanggulangan bencana, dalam hal ini adalah BPBD Kota Padang.

5.1. Kesimpulan

Kota Padang, merupakan salah satu Kota yang dihantam oleh gempa pada tanggal 30 September 2009 yang mengguncang provinsi Sumatera Barat pada umumnya, telah memakan korban jiwa dengan rincian 383 jiwa meninggal dunia, 431 jiwa luka berat, 771 luka ringan dan 2 orang hilang. Disamping itu total kerusakan rumah penduduk berjumlah 107.028 rumah dengan rincian 33.597 rumah rusak berat, 35816 rumah rusak sedang dan 37.615 rumah rusak ringan. Maka dari itu, adalah tugas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai lembaga Pemerintah Kota Padang bidang penanggulangan bencana untuk menanggulangi bencana tersebut dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar apabila bencana serupa terulang kembali, korban jiwa baik luka maupun meninggal dunia dan segala macam kerusakan dapat diminimalisir.

5.1.1. Upaya Pemulihan

Upaya pemulihan merupakan salah satu proses dalam penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang. Secara umum, proses pemulihan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Dalam prosesnya, upaya pemulihan mencakup 4 kegiatan yaitu perencanaan, koordinasi, pengkajian kerusakan serta uang dan perlengkapan. BPBD Kota Padang, selaku badan yang bertugas untuk melakukan upaya pemulihan pasca

gempa, mempunyai caranya sendiri dalam memulihkan Kota Padang, dimana cara-cara yang ditempuh oleh BPBD tentu saja termasuk dalam 4 kegiatan tersebut. Upaya pemulihan tersebut sudah dilakukan dimulai dari akhir tahun 2009 hingga saat ini.

Dalam melakukan upaya pemulihan, ada 8 pokok kebijakan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk memperbaiki kondisi Kota Padang yang luluh lantak pasca gempa. Perencanaan yang pertama adalah memindahkan pusat pemerintahan Kota Padang dari Kecamatan Padang Barat ke Kecamatan Koto Tangah. Karena gedung balai kota yang ada rusak berat dan nyaris runtuh ketika terjadinya gempa, maka diputuskan lah untuk membuat kantor walikota yang baru. Keputusan tersebut diambil selain untuk memecahkan kepadatan yang ada di Kota Padang juga karena kantor Walikota yang lama letaknya dekat dengan pantai, terlalu berbahaya dan dikhawatirkan akan tersapu oleh air laut apabila terjadi tsunami.

Perencanaan yang kedua adalah pemulihan ekonomi dan revitalisasi Pasar Raya. Perencanaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat Kota Padang yang lesu sebagai dampak dari gempa yang lalu. Hal itu dibuktikan dengan adanya inflasi yang tinggi mahalnya bahan kebutuhan pokok, meningkatnya jumlah pengangguran yang secara keseluruhan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat Kota Padang yang turun drastis. Dalam perencanaan ini juga dibangun kembali Pasar Raya yang di Kota Padang merupakan pasar tradisional terbesar untuk menghidupkan kembali aktivitas jual beli masyarakat dan menyelamatkan kehidupan para pedagang. Selain itu, adapula bantuan uang yang diberikan Pemerintah kepada para pedagang dan pelaku UKM untuk menggerakkan roda perekonomian yang diharapkan segera pulih.

Adapun perencanaan yang ketiga yaitu re-organisasi jaringan transportasi Kota Padang. Perencanaan ini meliputi Rencana induk transportasi Kota Padang, penyusunan *Bus Rapid Transit* (BRT) Kota Padang, rehabilitasi pengembangan fasilitas lalu lintas, penyediaan sarana pengujian kendaraan bermotor serta rehabilitasi dan pengembangan pelabuhan Teluk Bayur dan penataan sistem perparikiran. Tujuan dilakukan perencanaan ini adalah untuk menata kembali atau dapat dikatakan merapikan sistem dan jaringan transportasi Kota Padang yang sudah cukup semrawut saat ini.

Penataan kawasan pusat kota lama menjadi tahap perencanaan yang keempat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang. Di daerah ini terletak bangunan-bangunan kuno bersejarah peninggalan zaman penjajahan Belanda yang merupakan cagar budaya. Ketika gempa, banyak bangunan-bangunan tersebut yang rusak, bahkan hancur. Melalui perencanaan kebijakan ini, diharapkan dapat membangun kembali bangunan-bangunan bersejarah tersebut dengan tidak meninggalkan bentuk aslinya sehingga masih dapat dipertahankan sebagai bangunan cagar budaya dan menjadi daya tarik Kota Padang.

Perencanaan yang kelima adalah pemulihan sarana pendidikan dan kesehatan. Pada kenyataannya, fasilitas pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan paling parah sebagai akibat dari gempa. Banyak siswa yang diliburkan akibat sekolah mereka hancur, sebagian lagi menggunakan tenda di halaman sekolah untuk tetap belajar. Begitu pula fasilitas kesehatan, banyak puskesmas dan rumah sakit yang mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, perencanaan ini dijadikan sebagai rencana prioritas yang mendesak untuk dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Padang. Alasannya adalah karena sarana pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu sarana yang paling penting untuk diperbaiki sehingga para siswa dapat terus menuntut ilmu dan para korban bencana mendapatkan pertolongan yang baik dengan menggunakan sarana kesehatan yang ada.

Upaya pemulihan rumah masyarakat juga termasuk kedalam rencana Pemerintah Kota Padang saat melakukan upaya pemulihan. Hal ini merupakan bukti kepedulian Pemerintah Kota Padang terhadap warganya. Upaya pemulihan yang dilakukan berupa pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa. Perencanaan selanjutnya adalah pemulihan dini mental masyarakat. Sebagai akibat dari bencana, tentu saja banyak masyarakat yang mengalami trauma, stres, bahkan ada yang sampai kondisi kejiwaannya terganggu. Untuk itu dilakukan pemulihan mental masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi stres dan trauma pada masyarakat. Proses ini sendiri dinamakan *Traumatic Healing* yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat khususnya individu-individu yang mengalami stres ataupun trauma akibat gempa.

Perencanaan yang terakhir adalah revisi RTRW dan RPJM. RTRW yang dibuat akan memperhatikan aspek kebencanaan dimana nantinya setiap penataan

wilayah di Kota Padang akan dibuat dengan konstruksi yang tahan gempa. Yang tujuannya untuk mencegah terjadinya kerusakan bangunan yang lebih parah. Sementara untuk RPJM Kota Padang sebenarnya sudah selesai disusun pada tahun 2009 yang lalu. Namun agar lebih memperhatikan aspek pencegahan kebencanaan, khususnya mitigasi maka dirasa perlu untuk dikaji kembali dan ditinjau ulang.

Dalam melakukan upaya pemulihan, tentu saja Pemerintah Kota Padang tidak bisa bergerak sendiri, ada pihak-pihak lain yang dilibatkan untuk membantu dalam rangka percepatan pemulihan Kota Padang. Oleh sebab itu, sebagai bentuk komunikasi dengan pihak lain, diperlukan koordinasi. Pada dasarnya koordinasi merupakan kegiatan dimana adanya sebuah hubungan yang kompleks saling berkaitan satu sama lain yang terjaga dengan baik. Kesuksesan dari koordinasi upaya pemulihan pasca-bencana tergantung kepada kemampuan perencana untuk mencapai gambaran secara luas dalam struktur koordinasi. Adapun koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang bersama-sama dengan pihak-pihak seperti BAPPEDA, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang, Dinas, PU, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Lembaga Pertahanan, Universitas Andalas, Universtas Negeri Padang, Universitas Bung Hatta,dll.

Aspek pemulihan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang ialah pengkajian kerusakan. Saat melakukan implementasi mengenai pengkajian kerusakan, Pemerintah Kota Padang melakukan apa yang disebut dengan DALA (*Damage And Loss Analysis*). Mereka menganalisa apa saja yang menjadi kerusakan akibat gempa, berapa kerugiannya, kemudian bagaimana penanganannya. Kemudian dari hal-hal tersebut akan diproses lebih lanjut untuk ditentukan apa yang akan dilakukan dengan bangunan yang sudah rusak tersebut. Khusus untuk pemulihan rumah penduduk, BPBD Kota Padang bekerja sama dengan masyarakat untuk menunjuk seorang fasilitator. Fasilitator ini mempunyai fungsi sebagai penghubung antara masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa dengan pihak pemerintah Kota Padang.

Untuk melakukan upaya pemulihan penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Padang tentu saja membutuhkan uang dan perlengkapan lainnya. Tanpa itu semua, niscaya tidak ada upaya pemulihan yang dapat dilakukan. Sumber dana yang Pemerintah Kota Padang untuk melakukan upaya pemulihan didapat dari

berbagai sumber. Yang terutama adalah berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Sumber lainnya seperti dari APBD Kota Padang, APBN, lembaga BUMN seperti Pertamina, Bank Mandiri, Semen Padang. Kemudian ada juga bantuan dari pihak swasta yang berasal dari stasiun TV RCTI, TVOne, Metro TV. Bantuan asing pun turut membantu dalam memberikan dana antara lain Bank Dunia, Pemerintah Jepang, Arab Saudi, Hongaria, dll. Adapun total dana yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk memulihkan kembali Kota Padang pasca gempa berkisar 2 triliun rupiah. Sementara untuk saat ini, mereka baru memperoleh setengah dari jumlah tersebut.

5.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam melakukan upaya pemulihan ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat kinerja Pemerintah Kota Padang. Faktor pendukung tersebut adalah kesungguhan Pemerintah Kota Padang dalam melakukan upaya pemulihan, hal itu dikarenakan Pemerintah Kota Padang juga turut merasakan kerusakan dan kehancuran Kota Padang sehingga mereka bekerja keras untuk sesegera mungkin membangun kembali Kota Padang. Faktor pendukung lainnya ialah tenaga ahli profesional, dimana tenaga ahli tersebut benar-benar mampu dalam mengatasi masalah yang ada di Kota Padang pasca gempa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Faktor pendukung yang terakhir adalah peran aktif peserta pelatihan penanggulangan bencana. Hal ini dibuktikan dengan peserta yang dilatih untuk mengantisipasi bencana sangat aktif dan bersemangat mengikuti kegiatan pelatihan.

Adapun hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam rangka memulihkan bencana gempa yang lalu adalah kurangnya ketersediaan dana. Sampai saat ini, dana yang ada belum mencukupi total keseluruhan dana yang diperlukan. Faktor penghambat yang kedua adalah Pemerintah Kota Padang kekurangan SDM, oleh sebab itu mereka harus mengambil tenaga ahli dari pusat seperti dari BAPPENAS dan BNPB. Faktor lainnya yaitu Pemerintah Kota Padang kesulitan dalam rangka melakukan pendataan korban jiwa dan kerusakan. Hal itu berkaitan dengan kurangnya tenaga ahli yang mereka peroleh, sehingga dibutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Hambatan yang terakhir adalah para pedagang disekitar kawasan Pasar Raya yang tidak kooperatif. Mereka menolak untuk dipindahkan

sementara agar Pasar Raya tersebut dapat dibangun kembali, sehingga pembangunan Pasar Raya untuk saat ini menjadi terhambat.

5.2. Saran

Terkait dengan kesimpulan tentang upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah kota Padang beserta dengan faktor penghambat dan pendukungnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan terhadap para pedagang di kawasan Pasar Raya dengan cara duduk bersama, berembuk dan berdiskusi guna mencari suatu pemecahan masalah yang solutif agar mereka mau dipindahkan untuk sementara, sehingga mempercepat proses pembangunan Pasar Raya tahap 2 dan tahap 3.
2. Pemerintah kota Padang harus mampu mendapatkan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup besar dari daerah-daerah lainnya, tidak hanya mengandalkan tenaga ahli dari pusat sehingga dapat mempercepat proses upaya pemulihan kota Padang pasca gempa.
3. Melakukan lobi-lobi terhadap wakil rakyat, dalam hal ini adalah DPR RI ataupun DPRD kota Padang demi mendapatkan anggaran pemulihan bencana yang lebih besar dari APBN dan APBD, sehingga proses pemulihan tidak lagi tersendat karena masalah dana.
4. Mempercepat proses pemberian bantuan pemulihan rumah masyarakat agar masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa tidak terbebani keuangannya dan bisa menempati rumahnya kembali secepatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barry, J. M. (1997). *Rising tide: The great Mississippi flood of 1927 and how it changed America*. New York: Simon and Schuster.
- Botterill, L. C., & White, D. A. (2005). *From Disaster Response to Risk Management: Australia's National Drought Policy*. AA Dordrecht: Springer.
- Bowles, W., & Alston, M. (1998). *Research for Social Workers : An Introduction to Methods*. Australia: Allen &Unwin.
- Chadwick, B. A. (1991). *Metode Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang: Press IKIP.
- Clarke, L. B. (1999). *Mission improbable: Using fantasy documents to tame disaster*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Coppola, D. P. (2007). *Introduction to International Disaster Management*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Gregory, P. (2008). *IT Disaster Recovery Planning For Dummies*. Indiana: Wiley Publishing, Inc.
- Grinell, R. M. (1993). *Social Work Research and Evaluation*. Itasca: F.E. Publisher.
- Gustin, J. F. (2005). *Disaster and Recovery Planning: A Guide for Facility Managers*. Lilburn: The Fairmont Press Inc.
- Haas, J. E., & Drabek, T. E. (1973). *Complex organizations: A sociological perspective*. New York: Macmillan.
- Haas, J. E., Kates, R., & Bowden, M. (1977). *Reconstruction following disaster*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Higgins, V. (2001). *Smoothing the Process of Change? A Genealogy of Farm Viability in Australia (1967-1997)*. Queensland.
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: FISIP UI Press.
- Marsella, A. J., Johnson, J. L., Watson, P., & Gryczynski, J. (2008). *Ethnocultural Perspectives on Disaster and Trauma: Foundations, Issues, and Applications*. New York: Springer.
- Moleong, L. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Petterson, J. (1999). *A Review of The Literature and Programs on Local Recovery from Disaster*. Fairfax, VA: Publik Entity Risk Institue.

- Rittinghouse, J. W., & Ransome, J. F. (2005). *Business Continuity and Disaster Recovery for InfoSec Managers*. Burlington: Elsevier Digital Press.
- Rodriguez H., Quarantelli E. L. & Dynes R. R. (2007). *Handbook of Disaster Research*. New York: Springer.
- Schneid, T. D., & Collins, L. (2001). *Disaster Management and Preparedness*. Florida: CRC Press LLC.
- Schwab, J. (1998). *Planning for Post-Disaster Recovery and Reconstruction*. Chicago.
- Spangle, W. (1991). *Rebuilding After Earthquakes: Lesson from Planners*. Portola Valley, CA: Author.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Vale, L. J., & Campanella, T. J. (2005). *The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster*. New York: Oxford University Press.
- Warto. (2003). *Uji Coba Penanggulangan Bencana Alam Pada Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: B2P3KS.
- World Health Organization. (2005). *Disaster, Disability, and Rehabilitation*. Geneva: Department of Injuries and Violence Prevention.
- Yin, Robert K. (1984). *Case Study Research Design & Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.

Jurnal

- Berke, P., Kartez, J., & Wenger, D. (1993). Recovery after disaster: Achieving sustainable development, mitigation, and equity. *Disasters*, 93-109.
- Bolin, R. C. (1986). Disaster impact and recovery: A comparison of black and white victims. *International Journal of Mass Emergencies and Disaster (IJMED)*, 35-50.
- Bolin, R. C., & Stanford, L. (1991). Shelter, housing and recovery: A comparison of U.S. disasters. *Disasters*, 24-34.
- Geist, D. E. (2000). By design: The disaster resilient and quality of life community. *Natural Hazards Review*, 151-160.
- Marshall, B., Picou, J., & Gill, D. A. (2003). Terrorism as disaster: Selected commonalities and long-term recovery for 9/11 survivors. *Research in Social Problems and Public Policy*, 73-96.
- Penner, R. D. (2010). Assault Rifles, Separated Families, and Murder in Their Eyes: Unasked Questions after Hurricane Katrina. *Journal of American Studies*, 573-599.
- Rolfe, J., & Britton, N. (1995). In Wellington after the Quake: The Challenge of Rebuilding Cities. *Organisation, Government and Legislation: Who Coordinates Recovery?*

Rubeen, C., & Barbee, D. (1985). Public Administration Review. *Disaster recovery and hazard mitigation: Bridging the intergovernmental gap. In emergency management: A challenge for public administration*, 57-63.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Website

Korban Bencana Gempa, 2009
(www.medicastore.com/artikel/295/index.html)

Bencana Gempa Bumi, 2009
(<http://www.indosiar.com/doc/26971450/Bencana-gempa-Bumi>)

Bumi Indonesia, 2009
(<http://www.indosiar.com/ragam/21472/bumi-indonesia-pun-terus-bergoyang>)

Penduduk Sumatera Barat, 2009
(<http://www.sumbarprov.go.id>)

IDEP Foundation, 2010
(www.idepfoundation.com)

Karya Ilmiah

Yadrison. (2003). *Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat*. Tesis, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.

Lampiran 1
PEDOMAN WAWANCARA

Hari/tanggal :

Jam :

Tempat :

Nama :

Jabatan :

1. Gambaran umum kondisi Kota Padang.
2. Gambaran umum Pemerintah Kota Padang bidang penanggulangan bencana
3. Gambaran umum upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap bencana gempa tahun 2009
4. Apa saja yang dilakukan pada saat melakukan upaya pemulihan pasca gempa:

a. Perencanaan

Apa yang dimaksud dengan perencanaan?

Perencanaan apa saja yang dilakukan?

Bagaimana menentukan perencanaan sebuah daerah yang terkena bencana?

Apakah ada evaluasi setelah perencanaan dilakukan?

b. Koordinasi

Apa definisi dari koordinasi?

Apa saja yang dilakukan saat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait?

Apakah hubungan/komunikasi dalam proses koordinasi antara pihak yang terkait berlangsung dengan baik?

c. Pengkajian Kerusakan

Apa yang dimaksud dengan pengkajian kerusakan?

Apa saja yang dilakukan saat melaksanakan pengkajian kerusakan?

Indikator apa yang digunakan dalam mengkaji kerusakan akibat dari bencana gempa?

d. Uang dan Perlengkapan

Dari mana saja suplay uang dan perlengkapan lainnya?

Alokasi uang dan perlengkapan digunakan untuk apa saja?

Apakah uang dan perlengkapan yang dialokasikan sudah tepat sasaran?

5. Faktor pendukung dan faktor penghambat seperti apa yang terjadi saat melakukan upaya pemulihan:

a. Faktor pendukung

b. Faktor penghambat



LAMPIRAN 2
TRANSKRIP WAWANCARA

Kode Pertanyaan	Pertanyaan	Kutipan Verbatim
A	Gambaran Umum Kota Padang	<p>“Kota Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Penduduknya hanya berkisar 850 ribu orang. Saya tidak tahu berapa persisnya, nanti bisa Mas lihat di BPS. Tidak pernah ada kerusuhan disini. Ada yang bilang bahwa kota Padang merupakan kota yang paling aman di Indonesia. Begitu pula dengan budaya Islam, masih cukup dominan disini. Suku mayoritas adalah Minangkabau dan bahasa Minang merupakan bahasa daerah kami. Apa lagi ya? Umumnya pekerjaan penduduk kami adalah berdagang. Banyak masyarakat Padang yang merantau ke luar daerah untuk mencari penghidupan yang baru atau mengadu nasib disana.” (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 690 ribu kilometer persegi, memiliki sebelas kecamatan dan sekitar 100 kelurahan, saya tidak ingat berapa angka pastinya. Jumlah penduduknya 850 ribu jiwa dengan mayoritas mata</p>

		<p>pencaharian adalah berdagang dan bertani. Untuk masyarakatnya sendiri tentu saja paling besar disini adalah suku Minang dan mayoritas beragama islam.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di tepi pantai Barat dengan jumlah penduduk sekitar 850an ribu jiwa. Tahun 2007, Kota Padang mengalami pemekaran dari 4 Kecamatan menjadi 11 Kecamatan. Pada umumnya masyarakat Kota Padang mempunyai mata pencaharian sebagai pedang. Nuansa Islam sangat dominan disini, mungkin 95% dari total penduduk Padang. Kota ini sangat aman, tidak ada macet dan kebanyakan penduduknya tertib dan taat aturan. Untuk jumlah penduduknya saya tidak tahu pasti berapa angkanya tetapi seingat saya berkisar 850 ribu.” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Padang adalah Ibu kota provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk 850 ribu. Untuk tata pemerintahan kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan yang berada di puncak hirarki pemerintahan adalah Walikota. Alhamdulillah masyarakat kami sangat tertib, tidak mudah bergejolak dengan adanya isu-isu. Selain itu juga ikatan kekeluargaan kami disini masih sangat erat, sehingga jarang sekali terjadi perampokan dan kekerasan.</p>
--	--	---

		Suku Minangkabau sangat dominan disini, begitu pula dengan penganut agama Islam.” (MM, Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang. 10 Oktober 2011)
B	Gambaran Umum Pemerintah Kota Padang bidang Penanggulangan Bencana	<p>“BPBD sendiri berdiri atau dapat dikatakan pengisian strukturnya dimulai pada bulan Maret 2009. Jadi otomatis belum genap 1 tahun ya, baru sekitar 6 bulan BPBD berdiri dan telah mendapatkan ujian dari tugas yang musti dilaksanakan. Gempa besar yang meluluhlantakan kota Padang, segala aspek sarana prasarana kota rusak total. Jadi dengan masa BPBD yang baru bekerja mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan itu... Eeeemmm sebenarnya struktur bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sudah ada. Jadi sudah ada Kabid dan Kasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, demikian juga di bidang-bidang lainnya di BPDB. Di bidang kedaruratan logistik juga sudah ada bidang pendataan dan juga Kasi evakuasi dan juga Kasi kesiapsiagaan sudah ada. Ini sudah lengkap semuanya. Hanya saja, dalam masa yang singkat semenjak berdirinya BPBD Kota Padang, pengalaman dari penanggulangan bencana dapat dikatakan sangan minim. Karena kita masih dalam banyak penataan kedalam pelatihan-pelatihan sementara tugas yang diemban sangat lah berat. (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p>

		<p>“Kami BPBD sebagai Pemerintah Padang bidang penanggulangan bencana berdiri sejak awal tahun 2009. Sudah ada SK walikota mengenai pembentukan BPBD Kota Padang pada saat itu. Berdasarkan SK tersebut SKPD BPBD Padang memiliki 16 BPH inti yang perinciannya bisa anda baca sendiri nanti dikertas yang sudah saya kasih. Tugas utama kami adalah menyusun dan menetapkan prosedur penanggulangan bencana, memetakan daerah rawan bencana, mengatur pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta masih ada tugas-tugas lainnya.” (MM, Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang. 10 Oktober 2011)</p>
C	<p>Gambaran Umum Proses Pemulihan Bencana Gempa 2009</p>	<p>“kami disini, BAPPEDA merumuskan bersama pihak-pihak yang terkait seperti BPBD Padang, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Walikota Padang. Saya sendiri tidak hadir dalam pertemuan tersebut, tetapi ada 8 pokok perencanaan atau program yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Sebagai upaya pemulihan kira-kira 8 program pokok itu bisa mewakili secara keseluruhan lah.” (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Pemerintah Kota melalui pimpinan walikota membentuk sebuah kelembagaan yang membantu tugas BPBD dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Badan baru tersebut dinamakan Badan Pendukung Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Mereka bukan SKPD, tetapi sebuah badan</p>

		<p>yang hanya membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan berada di bawah koordinasi BPBD. Oke. Orang-orang atau susunan organisasinya adalah dari pimpinan atau staf-staf Pemerintah Kota yang di pandang kompeten. Jadi di tambah dengan tim ahli yang bertugas untuk mencari format rehabilitasi dan rekonstruksi apa yang kira-kira pas diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi masalah pasca gempa. Terus kemudian setelah di bentuk BPRR akhirnya bekerja menelaah apa saja kebijakan-kebijakan yang akan di telaah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Upaya pemulihan yang kami lakukan dalam rangka menanggulangi gempa adalah 8 program pokok rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang. Secara umum itu, masih ada hal-hal lainnya tetapi tetap berpedoman ke pada 8 program tersebut, itu berlaku universal di Padang. Seluruh elemen pemerintah Padang tau mengenai 8 kebijakan tersebut.” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p>
D	Upaya Pemulihan Bencana Gempa	
D.1	Perencanaan	
D.1.1	Apa yang dimaksud dengan perencanaan?	“Kalau apa yang menjadi arti dari Perencanaan berdasarkan pedoman BAPPEDA itu adalah sebuah tahap dimana perumusan awal setiap kegiatan

		<p>yang akan dilaksanakan atau bisa dikatakan sebagai fondasi. Sedangkan menurut saya sendiri kira-kira sama lah seperti itu juga ya. (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Pada dasarnya perencanaan merupakan proses awal, tahap pemikiran atau ide-ide yang dirangkum yang kemudian disusun untuk dicari mana yang baik untuk memecahkan sebuah masalah.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Perencanaan itu bisa dikatakan sebagai ide awal untuk memikirkan atau menemukan solusi dari semua masalah” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Perencanaan itu kan berarti sebuah tahapan kegiatan awal yang berkelanjutan demi terciptanya kelancaran aksi.” (MM, Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang. 10 Oktober 2011)</p>
D.1.2	Perencanaan apa saja yang dilakukan?	<p>“Ada 8 pokok perencanaan yang kami lakukan dalam menaggulangi kota Padang. Mas bisa lihat sendiri di kertas yang saya kasih.” (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p>

		<p>“Untuk perencanaannya, kita memiliki 8 kebijakan dalam rangka merehabilitasi dan merekonstruksi kota Padang. Yang pertama pemindahan pusat pemerintahan, kedua pemulihan ekonomi dan revitalisasi Pasar Raya. Ketiga perbaikan jaringan transportasi, lalu yang keempat penataan kawasan pusat kota lama. Kemudian ada juga pemulihan sarana pendidikan dan kesehatan, perbaikan rumah penduduk, serta upaya pemulihan mental masyarakat dan yang terakhir adalah revisi RPJM dan RTRW.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Oh, kalo perencanaannya itu kan sudah jelas berupa 8 ketentuan pokok itu. Itu instruksi walikota dan berlaku menyeluruh bagi setiap elemen pemerintahan kota Padang.” (MM, Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang. 10 Oktober 2011)</p>
D.1.3	Bagaimana pelaksanaan proses perencanaan?	<p>“Pelaksanaannya sejauh ini bagus ya. Mas bisa lihat lagi dikertas yang saya kasih. Disana terlihat seperti apa progresnya. Ada yang sudah selesai, ada yang masih dalam tahap perbaikan.” (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Kalau pelaksanaan proses perencanaan itu sejauh ini bisa dikatakan baik-baik saja, walaupun ada beberapa masalah. Tapi semuanya masih di bawah kendali kami.” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p>

D.1.4	Apakah ada evaluasi setelah perencanaan dilakukan?	<p>Oooohh tentu saja ada. Kami selaku BAPPEDA disini langsung turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan Evaluasi. Biasanya hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sekali. (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Kalau evaluasi itu terus dilakukan setiap ada masalah selalu dikoordinasikan. Kira-kira konsep apa yang paling tepat untuk diterapkan. Untuk semua kebijakan ini selalu ada evaluasinya. Evaluasi itu, tidak ada jadwalnya. Tergantung apakah masalahnya mendesak atau tidak.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Evaluasi jelas ada, dengan evaluasi kami menjadi tahu apa yang kurang, apa lagi yang perlu diperbaiki.” (MM, Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang. 10 Oktober 2011)</p> <p>“Kami melaksanakan evaluasi, biasanya untuk kunjungan ke lapangan itu 2 sampai 3 bulan sekali.” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p>
D.2	Koordinasi	
D.2.1	Apa definisi dari koordinasi?	<p>“ Koordinasi itu kan seperti bekerja sama, ada kesepakatan. Masing-masing mengetahui apa yang harus dilakukan.” (FY, Kepala Sub Bidang</p>

		<p>Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Koordinasi itu kan komunikasi yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Dalam berkoordinasi berarti kan kita berhubungan atau mungkin berkomunikasi ya bahasa yang lebih tepatnya, dengan pihak-pihak berkompeten” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Koordinasi ya? Berarti komunikasi dengan pihak lain yang terkait demi tercapainya suatu tujuan.” (MM, Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang. 10 Oktober 2011)</p>
D.2.2	<p>Apa saja yang dilakukan saat berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait?</p>	<p>“Ketika berkoordinasi, kami saling kontak satu sama lain. Saling membantu untuk melihat apakah ada masalah atau tidak. Apabila ada pihak yang kesulitan, pihak yang lain siap membantu. Apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Apa ada penyelewengan atau tidak.” (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Ketika melakukan koordinasi, kami saling menghubungi satu sama lain,</p>

		<p>saling support, saling bantu. Apakah ada kendala atau tidak, apakah semua sudah sesuai rencana atau tidak. Kalau tidak, kita lihat apa yang salah. Berarti perlu dicari alternatif lain. Intinya kerja sama semua pihak untuk membangun kembali Kota Padang.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Saat berkoordinasi kita berhubungan dengan pihak-pihak lain. Misalnya saya sedang kunjungan ke rumah masyarakat yang rusak, nanti kemudian saya kontak pihak BPS untuk dicatat, begitu juga dengan pemulihan mental masyarakat kita kontak pihak UNP dan Univ. Andalas.” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p>
D.2.3	Apakah hubungan/komunikasi dalam proses koordinasi antara pihak yang terkait berlangsung dengan baik?	<p>“Oh iya berlangsung dengan baik lah, Mas. Kalau tidak baik bagaimana bisa berjalan? Ini demi kepentingan masyarakat Kota Padang juga.” (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Semua berlangsung dengan lancar.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Koordinasi sangat baik, khusus untuk bidang pemberian bantuan kerusakan rumah masyarakat komunikasi yang kami lakukan dengan</p>

		<p>masyarakat sangat kondusif dan benar-benar membantu kinerja kami.” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Pada kenyataannya proses kordinasi berlangsung dengan baik, komunikasi 2 arah terjalin baik. Sejauh ini tidak ada masalah dengan koordinasi.” (MM, Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang. 10 Oktober 2011)</p>
D.3	Pengkajian Kerusakan	
D.3.1	Apa yang dimaksud dengan pengkajian kerusakan?	<p>“Pengkajian kerusakan ya? Kalau itu kan berarti memilah-milah atau menentukan layak atau tidaknya sebuah bangunan untuk ditempati.” (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Berarti bagaimana kami menganalisa kerusakan yang terjadi.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Pengkajian kerusakan berarti menelaah sejauh mana sebuah bangunan terkena dampak. Bagaimana kerusakannya, bagaimana kondisinya, kurang lebih seperti itu.” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p>

		<p>“Pengkajian kerusakan ini seperti penelitian tentang bangunan yang rusak akibat gempa. Kira-kira upaya untuk mencari tahu bagaimana kondisinya.” (MM, Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang. 10 Oktober 2011)</p>
D.3.2	<p>Apa saja yang dilakukan saat melaksanakan pengkajian kerusakan?</p>	<p>“Misalnya, ketika ada sekolah rusak, bagaimana pengkajiannya? Kita hitung, seberapa besar kerusakannya. Masih layak kah untuk digunakan? Berapa besar kerugiannya? Seandainya tidak layak digunakan, seperti apa bangunan barunya? Mirip dengan bangunan lama atau berbeda? Khusus untuk pengkajian kerusakan rumah penduduk, BPBD Kota Padang bekerja sama dengan masyarakat untuk menunjuk fasilitator di setiap daerah dimana fasilitator tersebut bertanggung jawab kepada penanggung jawab operasional kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Fasilitator inilah yang melakukan pengkajian kerusakan. Dia mencatat bagaimana kerusakan rumah penduduk bagaimana kerusakannya, apakah bangunannya miring sekian persen, temboknya hancur, atau mungkin lantainya retak-retak, terbelah atau miring. Nanti dari situ baru dikategorikan apakah rumah tersebut termasuk kategori rusak berat, sedang atau ringan.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Kalau untuk itu, kita punya tim sendiri yang langsung terjun ke lapangan. Langsung meninjau bangunan-bangunan yang retak-retak atau bahkan rata</p>

		<p>dengan tanah. Disitu kami melihat kelayakan bangunan tersebut. Apabila masih layak berarti masih bisa di tempati, kalau tidak berarti harus bangun baru atau pindah. Kita punya yang namanya DALA. DALA ini adalah Damage And Loss Analysis. Kami menganalisa kerusakan dan kerugian sebagai dampak dari gempa yang lalu. Dari sana kita masukan kedalam laporan untuk nantinya diproses atau divalidasi namanya, kemudian setelah itu baru kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan dengan bangunan yang rusak tersebut. Jadi disini BAPPEDA menganalisa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan, bagaimana kondisinya, apakah masih layak dipakai atau tidak. Kalau sudah tidak layak mau diapakan. Begitu. Nanti dianalisa dan kemudian ditindak lanjuti” (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Saat mengkaji kerusakan kita melihat secara detil kondisi bangunan tersebut seperti apa. Sejauh apa kerusakannya, keadaannya bagaimana, masih bisa ditempati atau tidak, berbahayaakah jika dibiarkan, mendesak untuk diperbaiki atau tidak. Begitu.” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p>
D.3.3	Indikator apa yang digunakan dalam mengkaji kerusakan akibat dari bencana gempa?	“Lebih kepada fisik bangunannya sih Mas. Bagaimana kondisinya. Seperti yang tadi saya bilang, apakah retak, apakah rubuh atau justru masih baik-baik saja.” (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas

		<p>BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Dilihat dari fisik bangunan.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Indikator yang kami gunakan untuk mengkaji kerusakan tentu saja kepada fisik bangunan.” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p>
D.4	Uang dan Perlengkapan	
D.4.1	Dari mana saja suplay uang dan perlengkapan lainnya?	<p>“Kalau untuk sumber dana, kita peroleh dari APBN, APBD, serta bantuan yang bukan berasal dari Pemerintah. Kalau untuk APBN kan sudah jelas, berarti Pemerintah Pusat. Untuk APBD, ada 2, APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kota Padang. Sementara kalau dari bantuan luar kita ada dari Jepang dan Arab Saudi.” (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Pendanaannya, misalnya untuk kerusakan rumah yang mengalami rusak berat dan rusak sedang itu didanai dari APBN secara keseluruhan. Sudah ada peraturannya itu. Sementara untuk dana saringannya atau tim survei fasilitator dan kerusakan ringan didanai oleh APBD. Begitu juga dengan dana untuk pemindahan pusat pemerintahan dan revitalisasi pasar raya itu dananya sebagian dari APBN dan sebagian dari APBD. Hhhhhmmmm, kalau</p>

		<p>kebutuhan-kebutuhan misalnya alat berat saat membangun kembali gedung-gedung atau fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kita dapat bantuan dari Semen Padang. Mungkin juga kebutuhan-kebutuhan obat-obatan kita dapat dari Dinas Kesehatan untuk mengobati korban.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Untuk masalah dana sebenarnya saya engga tahu banyak ya. Sepengetahuan saya kita dapat uang dari Pemerintah Pusat dengan APBN, APBD juga kita terima baik Provinsi maupun Kota. Bantuan pihak swasta juga ada, kemudian ada juga dana masyarakat yang dihimpun dari beberapa lembaga swadaya. Pihak asing seperti negara Arab, Jepang, lalu ada juga Hongaria itu memberikan bantuan juga.” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Kita mendapatkan dana dari APBN dan APBD, tetapi yang utama itu dari APBD. Lembaga BUMN juga memberikan bantuan kok sama kita seperti Pertamina dan Bank Mandiri. Kalau dari pihak swasta ada beberapa stasiun TV seperti RCTI, MetroTV dan TV One.” (MM, Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang. 10 Oktober 2011)</p>
D.4.2	Alokasi uang dan perlengkapan digunakan untuk apa saja?	“Untuk alokasinya kan sudah jelas, Mas, ya untuk program pemulihan Kota Padang ini. Mas bisa liat sendiri di kertas yang saya kasih itu untuk

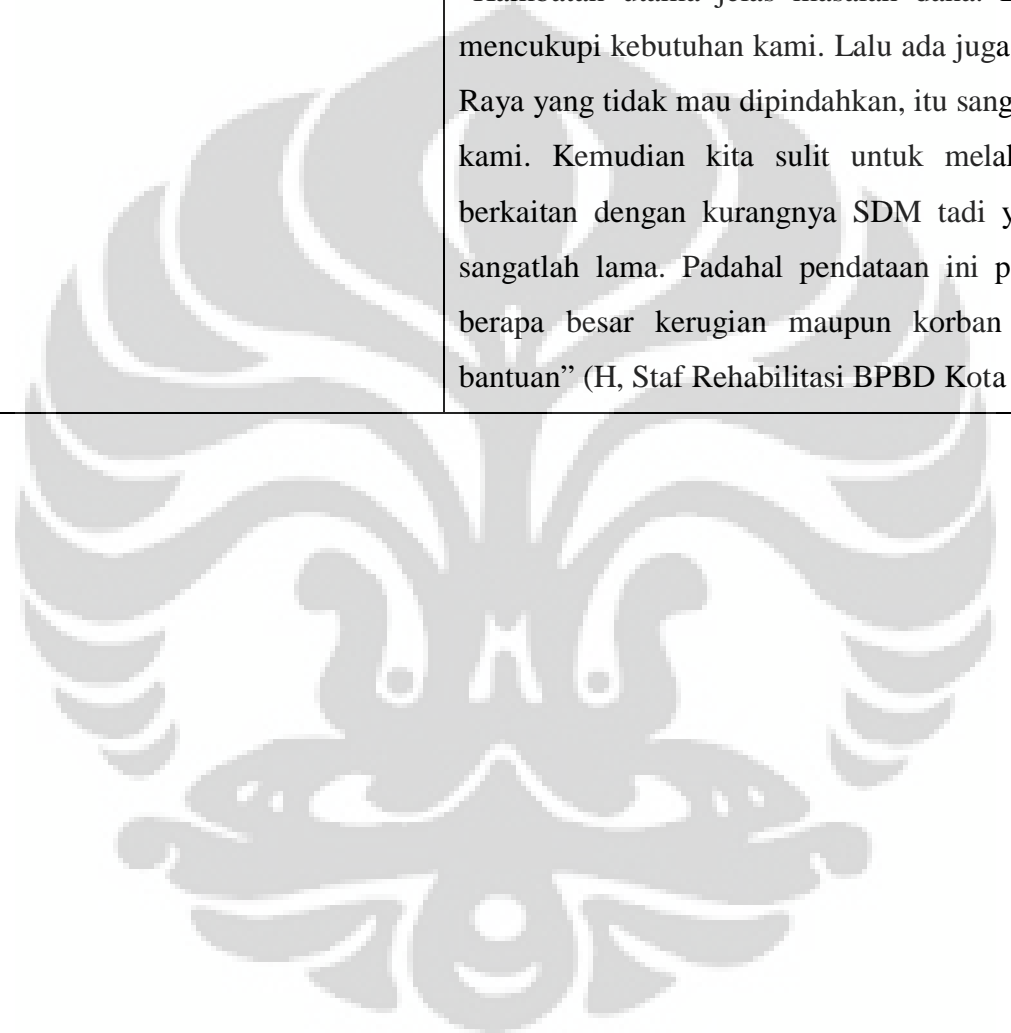
		<p>besarnya dana yang dibutuhkan.” (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Alokasinya kan jelas, 8 program perencanaan yang sudah saya jelaskan itu kan pasti butuh uang, dan jumlah yang dibutuhkan juga tidak sedikit.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“ Untuk alokasi dana tentu saja kita gunakan untuk memulihkan kembali kota Padang dengan acuan 8 program utama tersebut.” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p>
D.4.3	Apakah uang dan perlengkapan yang dialokasikan sudah tepat sasaran?	<p>Insya Allah benar-benar sampai, Mas. Itu sudah urusan pribadi lah kalau sampai ada korupsi dalam hal ini. Uang untuk membangun kehidupan masyarakat kok di gunakan pribadi. Tapi sejauh ini saya belum dengar ada penyelewengan. (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>Kalau sudah tepat sasaran atau belum, saya percaya setiap elemen Pemerintah Kota Padang pasti akan menyalurkan uang tersebut kepada yang berhak, atau menggunakannya seperti yang sudah tertera dalam perencanaannya.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p>

E	Faktor Penghambat dan Pendukung	
E.1	Faktor Pendukung	<p>“Hhhmmmm, kalau faktor pendukungnya ya dari perencanaan yang saya liat adalah mungkin itikad baik dari seluruh elemen Pemerintah Kota Padang. Terlebih mereka semua tinggal di Padang. Mereka mengetahui bagaimana kerusakannya, berapa besar korban jiwa, kerugiannya semua, dampaknya semua mereka rasakan. Semangat untuk membangun kembali Kota Padang juga terasa walaupun mereka tidak mendapatkan banyak dalam upaya pemulihan ini. Tapi nilai moralnya itu yang patut di apresiasi. Kita tetap memberikan honor untuk para profesional dan tim ahli, tapi tidak banyak. Walaupun begitu mereka tetap senang hati untuk melakukannya. Itu untuk elemen pendukung. Selanjutnya kerja sama tim dan koordinasi antar instansi yang bekerja, itu juga mendukung. Penempatan tenaga ahli dan SDM juga sudah cukup bagus, walaupun sebenarnya kita kekurangan tenaga ahli. Jadi harus mengambil dari luar daerah. Ya mereka-mereka ini sangat antusias sekali untuk bekerja dalam rangka membangun kembali Kota Padang.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Kalau untuk faktor pendukungnya... Hhhmmmm, apa ya? Mungkin lebih pada kesungguhan pihak Pemerintah Kota Padang untuk membangun kembali Padang. Karena disini kita semua merasakan kesulitan yang sama</p>

		<p>akibat gempa, maka dari itu kami bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Agar kehidupan kami bisa kembali normal. Selain itu dinamika masyarakat Padang cukup baik untuk memperbaiki Kota ini sendiri, seusai dengan motto Kota Padang ‘Kota Padang tercinta, kujaga dan kubela’. Kira-kira itu lah Mas.” (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Untuk faktor pendukung, saya sebagai orang lapangan berpendapat bahwa adanya kemudahan dalam memberikan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Mereka aktif, antusiasme tinggi dan mudah diajak bekerja sama. Ini juga kan mempercepat kerja kami.” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p> <p>“Kita punya tenaga ahli yang profesional yang kita ambil dari pusat, dalam hal ini berarti BNPB. Begitu pula dengan tenaga ahli di bidang kesehatan, pendidikan kita punya ahlinya meskipun bukan berasal dari Sumatera Barat.” (MM, Kabid Rehabilitas dan Rekonstruksi, 10 Oktober 2011)</p>
E.2	Faktor Penghambat	<p>“Kalau untuk faktor penghambat sudah jelas ya masalah kita dana. Mas bisa liat sendiri kita butuh dana 2T tapi untuk saat ini kita baru bisa mendapatkan 1T. Masih ada dana 1T lagi yang belum kita dapatkan. Faktor penghambat lainnya yaitu kami kekurangan SDM, tenaga profesional. Kita</p>

		<p>harus mengambil SDM dari luar daerah yang kebanyakan dari pusat. Nah, itu memakan waktu lama untuk segera bertindak, mulai dari waktu perjalanan, belum lagi mereka sering-sering pulang sehingga menjadi molor pengerjaannya. Selain itu juga ada beberapa kelompok masyarakat yang kurang koperatif seperti para pedagang Pasar Raya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mereka enggan di pindahkan untuk sementara. Padahal tujuannya untuk mempercepat pembangunan Pasar itu sendiri, tetapi karena mereka susah pindah, kita jadi kerepotan untuk menata kembali Pasar Raya. Kira-kira itu penghambatnya.” (FY, Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang. 12 Oktober 2011)</p> <p>“Untuk hambatannya yang paling besar tentu saja dana. Tidak mungkin menggunakan APBD semua, harus menggunakan APBN juga. APBN kami disini tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kegiatan upaya pemulihan. Maka dari itu kami juga sangat membutuhkan bantuan dari Pusat. Lalu untuk masalah berikutnya itu dari hhhmm... Penerimaan masyarakat. Khusus di bidang revitalisasi pasar raya seperti untuk yang tadi saya bilang, adanya penolakan dari para pedagang untuk dipindahkan sementara. Itu kan menghambat kerja kami.” (HM, Kepala Seksi Rehabilitasi BPDB Kota Padang. 7 Oktober 2011)</p>
--	--	--

		<p>“Hambatan utama jelas masalah dana. Dana yang ada sekarang belum mencukupi kebutuhan kami. Lalu ada juga masalah dengan pedagang Pasar Raya yang tidak mau dipindahkan, itu sangat-sangat menghambat pekerjaan kami. Kemudian kita sulit untuk melakukan pendataan. Mungkin ini berkaitan dengan kurangnya SDM tadi ya, jadi waktu yang dibutuhkan sangatlah lama. Padahal pendataan ini penting sekali untuk mengetahui berapa besar kerugian maupun korban jiwa serta untuk memberikan bantuan” (H, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Padang, 7 Oktober 2011)</p>
--	--	--



**PROGRESS CAPAIAN 8 POKOK PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KOTA PADANG
PERIODE 2010 - 2011**

NO	PROGRAM	KEGIATAN		DANA (Rp.)	SUMBER DANA	PROGRES	KETERANGAN	
		ITEM KEGIATAN	KEGIATAN					
1	Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang	a.	Masterplan Pusat Pemerintahan	393,845,000.00	APBD 2011	sudah selesai		
		b.	DED Pusat Perkantoran Pemko Padang	2,500,000,000.00	APBD 2011	sudah selesai		
		c.	Rehabilitasi dan Pembangunan Baru Kantor Camat Kota Tengah	1,860,000,000.00	APBD 2011	sudah selesai		
		d.	Pembangunan Fisik Kantor Walikota Padang Tahap I	10,000,000,000.00	APBD 2011	dalam proses		
		Jumlah		14,753,845,000.00				
2	Pemulihan Ekonomi dan Revitalisasi Pasar Raya dan Pasar Satelit	a.	Road Map Pemulihan Ekonomi	400,000,000.00	APBD 2010	sudah selesai		
		b.	DED Pasaraya dan Pasar Satelit	5,000,000,000.00	APBD 2010	sudah selesai		
		c.	Pembangunan Pasar Impres I	59,000,000,000.00	APBD 2010-2011	sudah selesai		
		d.	Rehabilitasi dan Pembangunan Baru Fasilitas Perikanan dan Kelautan	7,329,639,000.00	APBN dan APBD	sudah selesai TA 2010 dan Sedang Proses TA 2011		
		e.	Rehabilitasi dan Pembangunan Baru Fasilitas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan	8,237,061,000.00	APBD dan APBN	sudah selesai TA 2010 dan Sedang Proses TA 2011		
		f.	Bantuan untuk IKM/UKM Kota Pasca Gempa Tahun 2009 (termasuk Pembangunan Pasar Satelit Nanggalo dan rehab Pasar Tanah Kongsai, Pasar Alai dan Pasar Simp. Haru)	4,133,820,000.00	APBD dan APBN	sudah selesai		
Jumlah		84,100,520,000.00						
3	Re-organisasi Jaringan Transportasi	a.	Rencana Induk Transportasi Kota Padang	381,325,000.00	APBD 2010	sudah selesai		
		b.	Feasibility Study Terminal Tipe A	180,000,000.00	APBD 2011	dalam proses		
		c.	Penyusunan Pre-FS Program Bus Rapid Transit (BRT) Kota Padang	4,200,000,000.00	ADB	dalam proses pelaksanaan oleh Bappenas		
		d.	Penataan Sistem Perparkiran di Kota Padang	-	Pemerintah Hongaria	dalam proses pelaksanaan oleh Bappenas		
		e.	Rehabilitasi Rekonstruksi dan Pengembangan Traffic Light/Fasilitas Lalulintas	10,707,180,000.00	APBN dan APBD	sudah selesai/dalam proses		
		f.	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	5,200,000,000.00	APBN	dalam proses		
		g.	Rehab. dan Pengembangan Pelebaran Pelebaran Pelebaran Teluk Bungus	8,000,000,000.00	APBN	dalam proses		
		Jumlah		28,668,505,000.00				

NO	PROGRAM	KEGIATAN		DANA (Rp.)	SUMBER DANA	PROGRES	KETERANGAN
		ITEM KEGIATAN	Jumlah				
4	Penataan Kawasan Pusat Kota Lama	a. Perencanaan Penataan Kawasan eks. CBD		500,000,000.00	APBD 2010	sudah selesai	
		b. Penataan Kawasan Padang Lama	Jumlah	250,000,000.00	APBD 2010	sudah selesai	
5	Pemulihan Sarana Kesehatan dan Pendidikan	a. Road Map Pemulihan Fasilitas Pendidikan dan kesehatan		395,650,000.00	APBD	sudah selesai	
		b. Rehabilitasi dan Pembangunan Baru Fasilitas Pendidikan		133,586,618,155.00	APBN, Non Pemerintah (NGO)	sudah selesai	SD = 113 unit SMA/SMK = 8 unit SMP = 7 unit
		c. Rehabilitasi dan Pembangunan Baru Fasilitas Kesehatan	Jumlah	11,718,458,792.00	APBD, Non Pemerintah	sudah selesai dan dalam proses	Alat kesehatan, fisik dan gedung
6	Pemulihan Rumah Masyarakat dan Pemukiman	a. Rusak Berat	Jumlah	145,700,726,947.00			
		b. Rusak Sedang		418,995,000,000.00	APBN	selesai TA 2010	
		c. Rusak Ringan		229,350,000,000.00	APBN	selesai TA 2010	
7	Pemulihan Dini Mental Masyarakat	a. Traumatic Healing	Jumlah	686,207,720,000.00			
		b. Pelaksanaan simulasi bencana	Jumlah	100,000,000.00	APBD 2010	selesai	
		a. Revisi RTRW dan RPJM	Jumlah	677,350,000.00	APBD 2010/2011	selesai	
JUMLAH TOTAL				960,958,666,947.00			
BIAYA YANG DIBUTUHKAN UNTUK REHAB REKON				1,960,401,804,472.00			
PERSENTASE DANA YANG TELAH DI GUNAKAN				49.02%			
KEKURANGAN				999,443,137,625.00			
PERSENTASE KEKURANGAN DANA				50.98%			

Padang, Oktober 2011
A.n. Kepala BAPPEDA Kota Padang
Sekretaris,

Ir. Rudy Rinaldy, MT
NIP. 19680624 199703 1 006



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.17.15/Kesbangpol/2011

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari PLT Kabid Kewaspadaan Badan Kesbangpol Dan Linmas Prop.Sumbar
Nomor : B.070/1215/WAS-BKPL/2011 tanggal 05 Oktober 2011
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 06 Oktober 2011

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: SIGIT SETIAGENI
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 18 Maret 1989
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Jln.KIS Mangunsarkoro No.38
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Proses Recovery Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Padang.
Waktu/Lama Penelitian	: 1 (satu) bulan
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL	: BPBD Kota Padang, Bappeda
Anggota Rombongan	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 06 Oktober 2011
An. KEPALA
KANTOR KESATUAN BANGSA



Diteruskan Kepada Yth,

1. Kepala BPBD Kota Padang
2. Kepala Bappeda Kota Padang
3. Yang bersangkutan
4. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Jln. Kuini No. 79.A Telp. 0751 – 31554 Padang

REKOMENDASI

No.B.070/1215/WAS-BKPL/2011

Tentang
Izin Melaksanakan Riset

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat dari Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor : 2230/H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2011 tanggal 26 September 2011 Perihal Permohonan Riset, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Riset tersebut di Propinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : SIGIT SETIAGENI
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 18 Maret 1989
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. KIS. Mangunsarkoro No. 38 Padang
No.Kartu Identitas : 09.5301.180389.0232
Judul Penelitian : Proses Recovery Yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang.
Lokasi Tempat Penelitian : BPBD Prov. Sumbar, Kota Padang.
Waktu Penelitian : 1 Bulan
Anggota : -

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Riset.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Riset yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi Riset.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil Risetnya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Riset ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 5 Oktober 2011
AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
PROV. SUMATERA BARAT
PL PRABD KEWASPADAAN



Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.
2. Bapak. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Kepala BPBD Prov. Sumbar di Padang.
4. Sdr. Walikota Padang Cq. Kakan Kesbangpol dan Linmas Kota Padang di Padang.
5. Yang Bersangkutan.